

**PROSEDUR PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIATUR DALAM
ENAKMEN HUKUM KELUARGA ISLAM NO.6 TAHUN 2004 NEGERI
PERAK
(Studi Kasus Di Kabupaten Taiping Perak)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MOHD NAJIB BIN ABDULLAH SANI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim : 111309820**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

**PROSEDUR PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIATUR DALAM
ENAKMEN HUKUM KELUARGA ISLAM NO.6 TAHUN 2004 NEGERI**

PERAK

(Studi Kasus Di Kabupaten Taiping Perak)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MOHD NAJIB BIN ABDULLAH SANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Nim: 111309820

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Abdul Gani Isa, SH., MA
NIP: 195201101979021001

Pembimbing II,



Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

**PROSEDUR PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIATUR DALAM
ENAKMEN HUKUM KELUARGA ISLAM NO.6 TAHUN 2004 NEGERI
PERAK
(Studi Kasus Di Kabupaten Taiping Perak)**

SKRIPSI

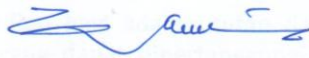
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal:

Senin / 07 Agustus 2017

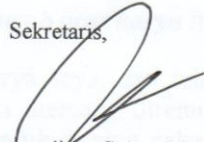
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Abdul Gani Isa, SH., MA
NIP: 195201101979021001

Sekretaris,



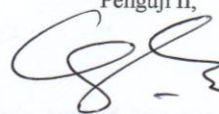
Edi Darmawijaya S. Ag., M. Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji I,



Dr. Khairani M. Ag
NIP: 197312242000032001

Penguji II,



Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 197603292000121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairani M. Ag
NIP: 197312242000032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mohd Najib Bin Abdullah Sani
NIM : 111309820
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2017
Yang Menyatakan



(Mohd Najib Bin Abdullah Sani)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada sekalian manusia di muka bumi ini. Salawat serta salam disampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang diutuskan untuk menyeru manusia ke jalan yang lurus. Tiada kata yang lebih indah dapat diungkapkan melainkan ucapan syukur atas segala nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyah) di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Sepanjang menyelesaikan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari *Rabb' Alamin*, tidak mungkin skripsi ini terwujud.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terumanya kepada Bapak Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., MA. selaku pembimbing I dan Bapak Edi Darmawijaya, s.Ag., M.ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberi bimbingan, dukungan, pengarahan serta nasehat berguna kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak dilupakan juga kepada Bapak Drs. Muslim Zainuddin M.Si. selaku Penasehat Akademik (PA) serta kepada Bapak Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Ketua Jurusan SHK, Staf Pengajar dan pejabat Fakultas syari'ah Dan Hukum, Kepala beserta Staf Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Badan Arsip dan Perpustakaan

Wilayah Aceh, Perpustakaan Baiturrahman Masjid Raya Banda Aceh, dan juga Perpustakaan Pascasarjana yang telah memberikan bantuan pada penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Teristimewa buat Ayahanda dan Ibunda tercinta, Abdullah Sani dan Hendon Ghazali yang telah banyak berjasa mendidik dan membimbing sejak dari kecil hingga kini. Semoga Allah memberikan balas jasa kepada keduanya dengan berlipat ganda atas amal saleh selama hidup ini hingga akhirat nanti, semoga Allah mengampuni dosa-dosa keduanya. Buat teman-teman serta tunang tercinta Nasyitah, terima kasih diucapkan atas dukungan, kata-kata semangat serta bantuan yang dihulurkan sepanjang perjalanan penulis menyiapkan skripsi ini. Baik dari sudut material maupun spiritual dan merupakan suatu yang bernilai untuk penulis. Hanya Allah saja yang bisa membalas segala jasa baik kalian dan semoga kasih sayang Allah sentiasa memayungi kehidupan kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhir kalam, hanya kepada Allah SWT kita memohon, semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 6 Juni 2017
Penulis,

Mohd Najib bin Abdullah Sani
111309820

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metodologi Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	16

BAB DUA : POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Poligami	17
2.2. Dasar Hukum dan Syarat Poligami	21
2.3. Tujuan dan Hikmah Poligami	30

BAB TIGA : PRAKTEK MASYARAKAT NEGERI PERAK TERHADAP POLIGAMI

3.1. Deskripsi Negeri Perak.....	38
3.2. Tatacara Poligami Di Mahkamah Syariah Perak	51
3.3. Faktor Ketidapatuhan Masyarakat Terhadap Prosedur Permohonan Izin Poligami.....	55
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Permohonan Izin Poligami Di Mahkamah Syariah Perak.....	60

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran-saran.....	68

DAFTAR PERPUSTAKAAN
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atas	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawah	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atas	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawah	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawah				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	ā
	<i>Kasrah</i>	ī
	<i>Dammah</i>	ū

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda Baca
ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta' *Marbūtah* (ة)

Transliterasi Ta' *marbūtah* (ة) ada dua:

- a. Ta' *marbūtah* (ة) hidup

Ta' *marbūtah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* mendapat transliterasinya adalah t.

- b. Ta' *marbūtah* (ة) mati

Ta' *marbūtah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Tā' *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah Tā' *marbūtah* ditransliterasinya adalah h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul
Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.

Nama/Nim : Mohd Najib Bin Abdullah Sani / 111309820
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Prosedur Permohonan Izin Poligami Yang Diatur Dalam Enakmen
Hukum Keluarga Islam No.6 Tahun 2004 Negeri Perak (Studi
Kasus Di Kabupaten Taiping Perak)
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., MA
Pembimbing II : Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag
Kata Kunci : Ketidapatuhan Masyarakat, Prosedur Permohonan Izin Poligami,
Daerah Taiping Perak

ABSTRAK

Di Malaysia, untuk berpoligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu daripada Mahkamah, ini karena dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak No.6 Tahun 2004 telah diatur dengan tegas tentang hal tersebut. Tujuannya adalah bagi memastikan tidak timbulnya masalah yang bakal dihadapi oleh istri dan juga anak-anak dikemudian hari. Namun begitu, untuk menghindari prosedural yang terdapat dalam Enakmen, banyak masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor ketidapatuhan masyarakat terhadap prosedur permohonan izin poligami, bagaimanakah prosedur permohonan izin poligami di Mahkamah Syariah Perak serta tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur permohonan izin poligami di Mahkamah Syariah Perak. Untuk mendapatkan jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan antara faktor ketidapatuhan masyarakat tersebut adalah karena biaya yang lebih rendah, tanggapan bahwa Enakmen bertentangan dengan Hukum Islam, prosedur permohonan izin poligami yang ketat dan permohonan poligami ditolak. Adapun tatacara permohonan izin poligami di Mahkamah Syariah Perak adalah pertamanya harus memohon kepada Mahkamah Syariah kebolehan untuk berpoligami. Setelah menerima permohonan dari pemohon untuk berpoligami, Mahkamah Syariah akan mengatur tanggal (sebutan) dalam 21 hari dari tanggal pendaftaran (perfailan) kasus. Di dalam kasus dimana istri tidak setuju suaminya berpoligami, Mahkamah saat sebutan kasus akan mengarahkan istri yang ada untuk menyediakan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan setelah Laporan Pembelaan lengkap, Mahkamah akan mengatur tanggal di depan Hakim Mahkamah Syariah untuk kasus dibicarakan. Jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun jika menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada tidak relevan dan Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus tersebut. Prosedur permohonan izin poligami yang ditetapkan dalam Enakmen juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Solusi yang dapat dijadikan alternatif adalah seharusnya laki-laki yang ingin berpoligami haruslah mengikuti prosedur Mahkamah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya bahwa perkawinan adalah “*akad yang sangat kuat (mitsaqon gholiidan) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).*”¹ Perkawinan tersebut juga merupakan kebutuhan fitrah manusia yang akan memberikan banyak hasil yang penting di antaranya pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran, dan bisa menyalurkan kebutuhan biologis yang halal, dikernakan hal tersebut merupakan keinginan yang kuat lagi penting dan disisi lain juga kita bisa melatih memikul tanggungjawab.²

Arti poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan.³ Hukum asal poligami bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 2.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 779.

terjerumus dalam perbuatan zalim, dibolehkan karena banyak mengandung maslahat. Diantaranya memelihara kesucian dan kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka, memperbanyak keturunan yang dengannya umat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak juga orang yang menyembah Allah swt semata.

Menurut sejarah, sistem pernikahan poligami ini telah berlangsung sejak masa pra Islam dan dipraktikkan oleh berbagai etnik masyarakat, seperti bani Israel, Arab Jahiliah dan Syaqlab atau Slavia yang merupakan asal usul bangsa-bangsa yang kini disebut Rusia, Lituania, Lethonia, Estonia, Polonia, Chekoslovakia dan Yugoslavia.⁴ Dewasa ini, poligami tetap sah di banyak negara termasuk sebagian besar negara Islam, kecuali Turki dan Tunisia. Dalam Undang-undang Negara Indonesia, poligami juga diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Adapun di Malaysia, permasalahan tentang isu poligami yang dibincangkan di Malaysia adalah bersumber dari ketidak fahaman masyarakat tentang konsep dan filosofi poligami sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Sekalipun pernikahan poligami diperbolehkan sebagaimana perceraian, namun keduanya tidak dianjurkan. Sebaliknya, poligami dan perceraian hanya dapat dilakukan jika ia berfungsi sebagai pemecah masalah kepada masyarakat. Namun apa yang terjadi di Malaysia, praktisi poligami kebanyakan tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-

⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Asep Sobari, jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 291.

Hadits, juga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keluarga Islam. Karena itu, isu poligami masih terus dibahas.⁵

Setiap negeri yang ada di Malaysia mempunyai legislasi tersendiri mengenai peraturan poligami yang terdapat dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam masing-masing, begitu juga negeri Perak. Dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak No.6 / 2004, Seksyen 23 (1) menyatakan bahwa apabila suami ingin berpoligami, maka syarat yang harus terpenuhi adalah mendapat persetujuan terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah Syariah, membuat akad nikah perkawinan yang lain dengan perempuan lain. Selain mendapatkan izin dari Hakim, suami juga harus mendapatkan izin dari isteri pertama yang bersedia memberikannya menikah dengan wanita-wanita lain.

Untuk mendapatkan izin dari isteri pertama biasanya suami merasa kesulitan, karena tidak semua isteri bersedia untuk dimadu oleh suaminya. Kesulitan inilah yang mengakibatkan suami menempuh alternatif lain untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Salah satu alternatif yang digunakan oleh suami untuk melanjutkan niatnya adalah dengan cara menikah di luar negeri. Mayoritas di antara mereka bila menikah di luar negeri menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab.

Ditetapkan syarat demikian supaya suami yang ingin melaksanakan poligami mempunyai kemampuan ekonomi, fisik dan aspek-aspek lain yang harus dimiliki

⁵Dasuki Haji Ahmad, *Poligami Dalam Islam*, Kuala Lumpur, (Pustaka Al-Hilal, 2010), hlm. 7.

oleh suami. Karena pada tahan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dapat diketahui bahwa ia mampu atau tidak bila melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang perempuan. Bila tahap pemeriksaan oleh Hakim terdapat ciri-ciri bahwa ia tidak memiliki kemampuan, maka Hakim dapat mencegah dan tidak memberikan izin kepada suami tersebut. Itulah sebabnya mereka memilih untuk menikah di luar negeri supaya terhindar dari berbagai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Enakmen.

Meskipun dalam Seksyen 23 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak No.6 / 2004 telah mengatur secara tegas mengenai prosedur berpoligami, namun pada realitasnya masih ada masyarakat yang lebih cenderung memilih jalan pintas dengan tidak patuh pada ketentuan tersebut, sebagai bukti terdapat kasus tentang poligami tanpa mengikut prosedur yaitu mereka yang melakukan poligami di luar negeri kemudian melaporkan kepada Mahkamah untuk memohon supaya didaftarkan perkawinan tersebut.

Sebagai contoh, kasus yang terdapat di Mahkamah Syariah Taiping Perak yaitu dengan nomor rujukan kasus 05013-013-0010-2014 yaitu kasus yang diajukan oleh Mohammad Ikhwan dan Nuraida (bukan nama asli). Mereka melakukan perkawinan poligami di Masjid Al Ahmadi, Selatan Thailand bertarikh 15 November 2013. Kedua pemohon tersebut telah melangsungkan pernikahan tanpa memohon izin

Mahkamah Syariah di Luar Negeri, kemudian memohon pengesahan perkawinan poligami tersebut di Mahkamah Syariah Taiping Perak.⁶

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon di atas, Hakim mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan poligami di luar negeri tersebut menurut Seksyen 12 (2) yaitu perkawinan yang sah menurut Hukum Syara' berdasarkan pengakuan dan keterangan dua orang saksi serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama di negara sempadan (perbatasan). Setelah mereka melaporkan, maka pernikahan mereka diakui oleh negara setelah mereka mendaftar kembali di Mahkamah Syariah Taiping Perak.

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dilihat bahwa meskipun telah diatur secara tegas di dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak No.6 / 2004 bahwa untuk berpoligami harus mengikuti prosedur di Mahkamah Syariah, namun masih saja ada sebagian masyarakat yang tidak patuh pada ketentuan tersebut. Ini dibuktikan lagi dengan adanya kasus-kasus yang terdapat di Mahkamah Syariah Taiping Perak di mana pihak yang melakukan poligami tanpa mengikut prosedur kemudian membuat permohonan kepada mahkamah Syariah supaya perkawinan poligami tersebut diakui oleh negara.

Oleh karena itu , penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang apa saja yang menjadi faktor masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Enakmen Hukum Keluarga

⁶ Maklumat Keputusan Perbicaraan Untuk Pengesahan Pernikahan Poligami Tanpa Kebenaran Di Bawah Seksyen 12 (2), berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2004.

Islam Negeri Perak No.6 / 2004 Seksyen 23 tentang poligami ini. Dengan itu penulis ingin mengambil satu langkah positif untuk membahas kajian ini dengan judul **Prosedur Permohonan Izin Poligami Yang Diatur Dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam No.6 Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus Di Kabupaten Taiping Perak)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan kepada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tatacara poligami di Mahkamah Syariah Perak?
2. Apakah faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur permohonan izin poligami ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur permohonan izin poligami di Mahkamah Syariah Perak.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tatacara poligami di Mahkamah Syari'ah Perak.
2. Untuk mengetahui faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur permohonan izin poligami.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur permohonan izin poligami di Mahkamah Syariah Perak.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan memahami judul di atas, maka penulis merasa bertanggungjawab menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Karena, setiap istilah memiliki arti tertentu yang dapat ditafsirkan menurut keinginan seseorang sehingga akan menimbulkan pengertian yang berbeda dari apa yang dimaksudkan penulis. Adapun istilah yang memerlukan penjelasan tersebut adalah :

1. Ketidapatuhan
2. Prosedur pendaftaran
3. Poligami Tanpa Izin
4. Mahkamah Syari'ah
5. Perak, Malaysia
6. Enakmen

Ad.1. Ketidapatuhan

Ketidapatuhan atau tidak patuh adalah merupakan suatu sikap seseorang yang tidak suka menurut atau tidak taat terhadap sesuatu perintah. Dalam sisi undang-undang, ketidapatuhan adalah merupakan sikap seseorang yang tidak mematuhi akan perintah, aturan, ketetapan yang telah ditetapkan oleh undang-undang di sesebuah negara.

Ad.2. Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur poligami. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.⁷

Ad.3. Poligami Tanpa Izin

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani yaitu *poly* dan *Gamein* atau *Gamos*. *Poly* artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan. Jadi, poligami berarti perkawinan yang banyak atau perkawinan dengan lebih dari satu orang, baik pria maupun wanita.⁸ Menurut Ghazaly, poligami secara terminologi adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁹ Sedangkan poligami tanpa izin adalah seorang suami melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan tanpa adanya izin atau kebenaran dari Mahkamah Syari’ah.

⁷Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Prosedur*, Januari 2016. Diakses pada tanggal 5 Januari 2016 dari situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>

⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005). hlm. 305.

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003). hlm. 123.

Ad.4. Mahkamah Syari'ah

Mahkamah Syari'ah dinamakan sebagai mahkamah Qadhi bagi menjalankan peraturan dan peruntukan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam bagi setiap negeri di Malaysia. Setiap negeri ditubuhkan sebuah Jabatan Agama Islam untuk mentadbir perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-undang di bawah peruntukan pentadbiran Agama Islam. Mahkamah Syariah adalah satu badan penting yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam pada setiap negeri.

Mahkamah Syari'ah adalah suatu badan pengadilan yang berwenang dalam menegakkan hukum. Mahkamah Syari'ah ditubuhkan oleh Enakmen¹⁰. Pentadbiran Agama Islam Negeri berfungsi membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen.¹¹

Ad.5. Perak, Malaysia

Negeri Perak atau juga dikenali sebagai Perak Darul Ridzuan merupakan salah satu daripada tiga belas buah negeri yang membentuk Malaysia. Negeri Perak merupakan negeri yang kedua terbesar di Semenanjung Malaysia, dan keempat terbesar di Malaysia. Selain daerah-daerah lain di Malaysia, Perak juga bersempadan antarabangsa dengan negara lain seperti Thailand (Wilayah Yala) di utara dan Pulau Sumatera, Indonesia di barat daya.¹²

¹⁰ Enakmen bermaksud klasifikasi (cabang) dari Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

¹¹ Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned, *Sistem Undang-undang Malaysia*, cet. 1, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007). hlm.56.

¹² Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Perak Darul Ridzuan*, Desember 2015. Diakses pada tanggal 20 Desember 2015 dari situs: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Perak_Darul_rizdzuan.

Ad.6. Enakmen

Enakmen merupakan kumpulan Undang-undang yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk, menyusun dan mengatur semua perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah setiap provinsi di Malaysia.

1.5. Kajian Pustaka

Umumnya buku berkaitan poligami banyak, akan tetapi, buku secara khusus membahas tentang faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap permohonan izin poligami sangatlah kurang. Oleh karena itu, kajian pustaka yang akan penulis lakukan adalah bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain, supaya dapat terhindar dari *duplikatif*. Penulis menemukan beberapa skripsi dan buku yang membahas tentang poligami. Di bawah ini adalah sebagian hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin, mengenai *Poligami dalam hukum Islam “(studi poligami dengan janda dan kaitannya dengan aspek sosial)”*, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Tahun 2001. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, poligami merupakan salah satu sistem perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan dua orang perempuan (isteri) atau lebih, maksimal 4 orang isteri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Tujuan poligami antara lain, menjadikan anak-anak yang lain dalam keadaan mulia, memperbanyak

keturunan, melestarikan kehidupan manusia, memelihara nasab dan menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Hikmahnya, poligami untuk kepentingan pendidikan, politik, sosial dan kemanusiaan, di samping itu mendapatkan keturunan, menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri yang lama, menyelamatkan suami yang hiperseks dan menjaga kaum wanita. Poligami dengan janda ditinjau dari aspek sosial, maka akan dapat membawa manfaat bagi janda dan suami serta anak-anak mereka baik dari segi zahiriah maupun batiniah.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ilham mengenai “*Poligami dalam kaitannya dengan berlaku adil (studi terhadap pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar*”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, tahun 2012.” Dalam penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa, konsep poligami menurut pandangan K.H Abdullah Gymnastiar adalah hal yang dibolehkan Allah, tetapi ia tidak menganjurkannya. Poligami dibolehkan dengan cara-cara tertentu sebagai *emergency ext*. Abdullah Gymnastiar menjelaskan tujuan utama poligami adalah menghilangkan citra bahwa poligami suatu kekeliruan atau kejahatan, menyadarkan masyarakat untuk berhati-hati dan tidak menggampangkan poligami. Selain itu, bagi yang sudah terlanjur poligami diharuskan menata keluarganya menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Implementasi konsep keadilan di antara isteri-isteri, menurut K.H Abdullah Gymnastiar dalam kehidupan berpoligaminya berusaha untuk berlaku adil diantara

¹³ Jalaluddin, *Poligami Dalam Hukum Islam, Studi Poligami Dengan Janda dan Kaitannya Dengan Aspek Sosial*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam IAIN Ar-Raniry: 2001.

kedua isterinya dengan memberikan kebebasan kepada isteri-isterinya untuk mengembangkan kemampuan dan kebutuhan mereka dan anak-anaknya.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maulia Nazakhatami mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Penghapusan Poligami Dalam Rancangan Amendamen Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Versi LBH APIK*”, program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2015. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemberlakuan poligami untuk perempuan pada zaman sekarang ini menurut LBH APIK tidak sesuai lagi, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan jika poligami masih dilakukan. Dengan alasan bahwa perkawinan poligami tersebut semata-mata ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris atau keturunan dari salah satu jenis kelamin. Dengan dasar pertimbangan di antaranya yaitu Undang-undang dasar 1945, dan juga Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).¹⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Shahlal Ahmad mengenai “*Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab)*”, program studi

¹⁴ Ilham, *Poligami Dalam Kaitannya Dengan Berlaku Adil (Studi Terhadap Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar)*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: 2012

¹⁵ Maulia Nazakhatami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Penghapusan Poligami Dalam Rancangan Amendamen Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Versi LBH APIK*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2015.

Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Tahun 2011. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, adil dalam poligami yang mendiskripsikan tentang metode pemikiran M.Quraish Shihab yang meliputi metode Ushul fiqih “*Saddu Zhari'ah*”, mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan (jika seorang tidak yakin dapat berlaku adil maka poligami dilarang baginya), dan penafsiran Al-Quran dengan topik tertentu yang berkaitan dengan poligami.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, wujudnya perbedaan di dalam pembahasannya dengan penelitian yang akan penulis kaji. Adapun penelitian penulis adalah memfokuskan tentang “prosedur permohonan izin poligami yang diatur dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam NO. 6 Tahun 2004 Negeri Perak (Studi kasus di Kabupaten Taiping Perak)”.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang penting bagi tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.¹⁷

Sudah kita ketahui bersama bahwa untuk mengakuratkan sebuah penelitian karya ilmiah haruslah dibuktikan dengan data-data fisik maupun non fisik. Data fisik berupa putusan-putusan pengadilan dan data non fisik berupa hasil wawancara dan lain-lain. Namun dalam hal pengumpulan data-data ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah

¹⁶ Shahlal Ahmad, *Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran m.Quraish Shihab)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam IAIN Ar-Raniry: 2011.

¹⁷ Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995). hlm. 22.

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan langkah- langkah sebagai berikut :

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam kalangan umat Islam.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang “Prosedur permohonan izin poligami yang diatur dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam No.6 Tahun 2004 Negeri Perak.”

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research).

Library research (penelitian kepustakaan) bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan tentang skripsi ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal, pendapat-pendapat para ahli dan undang-undang yang tentunya berkaitan dengan judul skripsi ini. Di samping itu, berbagai teori tentang kebudayaan dan mata rantai intelektual dapat ditelusuri dalam bahan pustaka, baik dari sumber literatur dan sejenisnya maupun dari sumber lainnya, seperti CD dan *website*.¹⁸

Field research (penelitian lapangan) adalah suatu cara perolehan data dengan cara terjun ke lapangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dari Mahkamah Syariah Taiping Perak untuk memperoleh data mengenai faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur permohonan izin poligami. Selanjutnya dilakukan wawancara secara langsung dengan mereka yang mempunyai kapasitas untuk membahas tentang masalah yang sedang diteliti.

1.6.4. Langkah-langkah Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan

¹⁸Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 319.

untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Sementara data yang tidak ada hubungan dengan penelitian akan diabaikan.

Sementara teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Gambaran yang lebih jelas dalam sistematika pembahasan ini terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab satu, berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua, berisi tentang Poligami Dalam Hukum Islam yang digunakan sebagai kerangka pembahasan serta konsep-konsep pokok tentang poligami yang terdiri dari Pengertian Poligami, Dasar Hukum Dan Syarat Poligami serta Tujuan Dan Hikmah Poligami.

Bab tiga, berisi tentang Praktek Masyarakat Negeri Perak Terhadap Poligami. Dalam bab ini diuraikan tentang Deskripsi Negeri Perak, Tatacara Poligami di Mahkamah Syari'ah Perak, Faktor Ketidapatuhan Masyarakat Terhadap Permohonan Izin Poligami, serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Permohonan Izin Poligami di Mahkamah Syariah Perak.

Bab empat, berisi tentang penutup. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *Polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak. Secara termonologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak lebih dari seorang).¹ Jadi perkataan *poligami* dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.

Dalam perkembangan istilah, poligini jarang sekali dipakai, bahkan boleh dikatakan istilah ini tidak lagi dipakai di kalangan masyarakat. Hingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami.

Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu kala. Poligami juga telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir.²

Islam juga membolehkan nikah lebih dari seorang. Kebanyakan umat dahulu dan agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh wanita, bahkan ada yang sampai seratus dan beratus-ratus tanpa suatu

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005). Hlm. 80.

syarat dan ikatan. Maka, setelah Islam datang, perkawinan lebih dari seorang ini diberikan batas dan bersyarat.

Firman Allah swt. dalam surah An-Nisa 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلُثٍ وَرُبِعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil³ maka (nikahilah) sorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberi pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁵

Jadi, jumlah terbanyak istri dalam berpoligami itu adalah empat wanita. Oleh karena itu, apabila seorang muslim sudah mempunyai istri empat orang, kemudian ia menikah lagi, maka pernikahan yang lebih dari empat istri itu tidak sah.

Dengan demikian, wanita yang kelima dan seterusnya dinilai bukan sebagai istri sehingga tidak perlu dilakukan talak. Akan tetapi, apabila pria yang beristri lebih dari empat tersebut non muslim yang kemudian sadar mau masuk Islam, maka dia harus

³ Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kuala Lumpur: Dar El_Fajr), hlm. 77.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 155.

memilih empat istri dan selebihnya hendaklah dicerikan, sesuai dengan ketentuan pilihannya.

Hal ini sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah saw. bahwa seorang sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam mempunyai istri lebih dari empat, maka setelah masuk Islam sahabat itu diperintah Rasul untuk memilih empat saja dan menceraikan selebihnya.⁶ Dalam kitab *Al-Halal wal Haram fil Islam* karangan Yusuf Al-Qardhawi ada mengatakan bahwa :

قد أسلم غيلان الثقفي وتحتة عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعاً وفارق
سأرهن

Artinya :

“*Sesungguhnya Ghailan ats-Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi bersabda kepadanya: pilihlah empat di antara mereka itu, dan cerailah yang lainnya.*” (Riwayat Ahmad, syafi’e, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaiban, Duruquthni, dan Baihaqi).⁷

Hal ini juga disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa “beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatasnya sampai empat orang istri”.⁸ Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁹

⁶ K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 132.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), hlm. 263.

⁸ Cv. Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukuum Islam*, (Bandung: Margahayu Permai, 2008), hlm. 17.

⁹ *Ibid*, hlm. 80.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa “dengan adanya pasal ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim”.¹⁰

Asal perkawinan adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksudkan dengan darurat adalah adanya alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan.¹¹

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui istrinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami). Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit. Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai istri dua, tiga dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga dan keempat.

Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandarmaju, 1990), hlm. 32.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 152.

tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan-alasan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-undang (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) secara limitatif yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

Pengadilan tidak akan memberi izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh istri kedua, ketiga dan keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di samping alasan-alasan yang disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 terpenuhi”.

2.2. Dasar Hukum dan Syarat Poligami

Banyak sekali pendapat para fuqaha' dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum syariat yang ditentang dan selalu

¹² H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 47.

dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam.

Adapun dasar hukum poligami adalah terletak pada surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَرُوعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) sorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*¹³

Berlaku adil menurut ayat tersebut adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Sebenarnya Islam datang bukan untuk memberikan kebebasan sebeb bebasnya bagi kaum laki-laki untuk berpoligami, tapi datang untuk membatasinya. Oleh karena itu Islam tidak membiarkan laki-laki berbuat sekehendak nafsunya, tapi Islam mensyaratkan keadilan dalam berpoligami, jika tidak mampu maka dispensasi ini dilarang untuk dilakukan. Dalam surah An-Nisa' ayat 3 tersebut berfungsi memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal 4 istri dan ketentuan syarat mesti berlaku adil.

Jadi poligami dalam syariat Islam memiliki hukum dasar dibolehkan (*mubah*) dengan syarat asas keadilan dan tentu saja kecukupan harta dan kemampuan-kemampuan lainnya. Sebagaimana halnya dengan hukum nikah yang hukum asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi seseorang yang tentu saja setiap

¹³ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 77.

orang berbeda kondisinya dengan yang lainnya, bisa menjadi wajib, sunnah ataupun haram.

Begitu juga dengan poligami, apabila tidak bisa berlaku adil maka seorang saja, karena yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Tujuan sebenar suatu pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ketika Allah membolehkan poligami tentu bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Selama ini yang membuat syariat ‘poligami’ buruk bukanlah ajarannya, namun lebih kepada praktek pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi syarat keadilan dan kemampuan, lebih cenderung pada keinginan pemuasan hawa nafsu yang dibungkus dengan alasan ‘sunnah’ yang harus dilaksanakan dengan mengenyampingkan faktor ketakutan dan ketakwaan pada Allah.¹⁴

Syarat Poligami

Syarat yang ditentukan Islam untuk berpoligami ialah terpecahnya seseorang muslim terhadap dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makan, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun nafkahnya, siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini maka dia tidak boleh nikah lebih dari seorang.

Firman Allah dalam surah AnNisa’ 3:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

¹⁴ Herlina Amran, *Poligami Dalam Islam*, 2 Mac 2014. Diakses pada tanggal 3 Juni 2017 dari situs: <http://firmadani.com/poligami-dalam-islam>.

Artinya:

... kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja...¹⁵

Rasulullah saw bersabda:

منكأنت له امرأتان, فمال إلى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

Artinya:

“Barangsiapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari Kiamat dengan tubuh miring.”(HR Ahmad dan Imam Empat. Sanadnya Shahih)¹⁶

Yang dimaksudkan dengan condong yang diancam dalam hadis tersebut ialah meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati, sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Allah memberikan maaf dalam hal tersebut. Seperti tersebut dalam firmanNya dalam surah An-Nisa’ 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِغْلَقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.

Oleh karena itu, setelah Rasulullah membagi atau menggilir dan melaksanakan keadilannya, kemudian beliau berdoa:

¹⁵ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 77.

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 464.

اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

Artinya:

“Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya.”(HR Imam Empat).¹⁷

Penetapan berlakunya poligami oleh Islam beserta dengan batasan-batasan tertentu dengan cara menetapkan poligami itu dengan syarat-syaratnya sendiri, sebenarnya mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk meratakan kesejahteraan keluarga dan untuk menjaga ketinggian nilai dikalangan masyarakat Islam seterusnya meningkatkan budi pekerti kaum muslimin. Berikut adalah syarat-syarat berpoligami yang telah digariskan oleh syara’ yaitu:

2.3.1. Wanita yang dikumpulkan dalam satu masa itu bukan bersaudara.

Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh itu, Islam telah melarang sama sekali untuk seorang laki-laki yang berpoligami itu mengumpulkan kakak dengan adik, ibu dengan anak perempuan atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya dalam satu-satu masa.

Firman Allah swt. dalam surah An-Nisa’ 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 81.

2.3.2. Bersikap Adil

Berlaku adil kepada istri-istri merupakan hak pernikahan yang paling kuat dan paling besar. Hal ini merupakan motif terpenting dalam menjaga kebaikan dan kestabilan dalam keluarga dan akan menghasilkan saling pengertian diantara mereka.¹⁹

Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seseorang laki-laki itu mengamalkan poligami. Syara' amat menitikberatkan keadilan dalam amalan tersebut. Adil yang dimaksudkan ini merangkumi pelbagai segi lahiriah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri serta perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman.²⁰

Manakala keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang pula tidaklah menjadi satu syarat utama karena ia termasuk dalam kekuasaan Allah swt. sekalipun manusia sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan kasih sayang tersebut. Seandainya kasih sayang dari segi cinta dan kasih sayang merupakan satu syarat yang wajib, maka mustahil bagi seorang hamba dapat berbuat demikian.

Allah swt. memberitahukan bahwa berlaku adil di antara istri-istri dalam segala hal adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, meskipun suami bisa berbuat adil dalam sikap dan perbuatan yang nampak, namun perbedaan mesti selalu ada, khususnya dalam hal cinta, syahwat dan jimak, ketenangan, ketenteraman dan kasih sayang.

¹⁹ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 173.

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 90.

Nabi saw. adalah orang yang paling adil dalam segala hal. Beliau berbuat adil kepada istri-istrinya dalam berbagai perbuatan zhahir selama beliau mampu. Beliau tidak memihak satu istri dan menjauhi yang lain, tidak juga melebihkan pemberiannya kepada yang satu dan tidak kepada yang lain. Walaupun Rasulullah saw. telah berbuat adil dalam hal itu, akan tetapi beliau lebih mencintai Aisyah r.a. daripada istrinya yang lain, aisyah mempunyai kedudukan khusus di hati Nabi saw. yang tidak dimiliki oleh istri beliau yang lain. Bahkan Aisyah adalah orang yang paling beliau cintai.²¹

Namun begitu, perasaan lebih mengasihi seseorang istri melebihi istrinya yang lain tidak boleh ditunjukkan kepada istri-istri yang ada karena dikhuatiri akan menimbulkan fitnah. Keadaan ini terpulang kepada suami untuk mengawalinya.

2.3.3. Giliran

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan giliran yang sama dan adil terhadap istri-istrinya. Menurut pendapat yang sah, suami wajib mengundi para istri untuk memilih mana yang lebih dulu digilir, bila mereka tidak redha dengan jadwal yang dibuatnya. Undian ini penting untuk menghindari sikap pilih kasih, sementara setiap istri mempunyai hak yang sama. Jadi, suami bisa memulai giliran dengan istri yang undiannya keluar. Ketika masa gilirannya telah habis, suami mengundi tiga istrinya yang lain, kemudian mengundi antara dua istrinya. Jika satu siklus giliran sudah berakhir, untuk selanjutnya dia menggunakan urutan giliran yang sudah ada (tidak perlu mengundi lagi). Suami haram mengistimewakan sebagian istrinya di atas sebagian yang lain dalam hal jatah giliran.²²

²¹ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, hlm. 176.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi' I 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 540.

Sekiranya suami mempunyai dua orang istri dan salah seorang istrinya itu adalah merdeka dan seorang lagi hamba, maka giliran bagi istri yang merdeka itu adalah dua malam dan bagi yang hamba pula ialah satu malam. Apabila suami nikah lagi dan istri barunya itu masih lagi seorang gadis, maka gadis tersebut berhak mendapat giliran selama tujuh malam berturut-turut dimulai dari hari perkawinan mereka. Sekiranya wanita yang baru dikawini itu merupakan seorang janda, maka dia berhak untuk mendapat giliran selama tiga malam berturut-turut dari tanggal perkawinan. Ini bersesuaian dengan sepotong hadis:

وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا, ثم قسم واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya:

“Anas radhiyallaahu ‘anhu brkata, “Menurut sunnah, apabila seseorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian membagi giliran; dan apabila ia menikah lagi dengan seorang janda, hendaklah ia berdiam dengannya tiga hari, kemudian membagi giliran,”(Muttafaq ‘alaih dengan lafazh Bukhari).²³

Namun begitu, giliran mereka akan kembali seperti biasa dan sama dengan istri-istri yang lain setelah seminggu dan tiga hari tersebut karena waktu yang diberi tadi adalah sebagai satu cara merayakan perkawinan mereka yang baru berlangsung. Ketetapan ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah saw:

للبركر سبع وللثيب ثلاث

Artinya:

“Tujuh malam bagi perawan dan tiga malam bagi janda”. (Ibn Majah)

²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, , hlm. 465.

Ulama' tabiin berpendapat tentang masalah ini bahwa si suami hanya bisa bermalam padanya selama tiga hari tiga malam bagi istri yang baru yang masih perawan. Sedangkan bagi istri yang baru yang sudah janda hanya selama dua hari dua malam. Dari kedua pendapat ini, adalah pendapat pertama lebih kuat sesuai dengan zahir hadis itu.

Pembagian giliran di antara para istri ini adalah bergantung kepada keadaan suami itu sendiri. Jika suami bekerja pada siang hari, dia mestilah membuat giliran untuk sebelah malam dan begitu juga sebaliknya, kecuali para istri mengizinkan suaminya untuk mengubah giliran pada masa-masa tertentu.

2.3.4. Berkuasa menanggung nafkah

Apa yang dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah nafkah zahir. Para ulama bersetuju dan sependapat bahwa apa yang dikatakan berkuasa menanggung nafkah ialah sanggup menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan dan diperlukan oleh istri.

Ringkasnya nafkah zahir yang dimaksudkan itu ialah segala keperluan berbentuk kebendaan yang menjadi keperluan asasi setiap orang. Cuma nilai-nilainya saja yang berbeda-beda berdasarkan penilaian kemampuan suami. Jika suami merupakan seorang yang agak susah, maka kadar nafkah yang perlu diberikan kepada para istrinya adalah mengikut kadar nafkah yang biasa diberikan oleh orang yang susah kepada istri mereka walaupun istri tadi berasal dari golongan berada.

Sekiranya suami itu dari golongan kaya dan mewah, maka nafkah yang perlu diberikan kepada setiap istrinya adalah seperti nafkah yang diberikan mengikut kebiasaan orang kaya tidak kira sama ada istrinya dari golongan kaya atau miskin.

Peruntukan tentang nafkah ini juga telah diterimapakai dalam Seksyen 23 (4) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 yang memperuntukkan bahwa pihak suami haruslah mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung semua istri dan orang tanggungannya, bahwa dia berupaya memberi layanan sama rata kepada semua istrinya, dan bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan *Darar Syari'e* kepada istri yang sedia ada.²⁴

2.4. Tujuan dan Hikmah Poligami

Terdapat banyak faktor yang sering memotivasi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Selama dorongan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tentu tidak ada cela dan larangan untuk melakukannya. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang menjadi pertimbangan kaum laki-laki dalam melakukan poligami:

2.3.1. Tujuan karena biologis

Artinya seorang laki-laki mempunyai nafsu syahwatnya yang sangat kuat dan tidak terbendung dengan satu istri saja, sehingga membutuhkan dua atau empat istri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tujuan yang pertama ini merupakan tujuan khusus untuk poligami.

2.3.2. Tujuan karena kekayaan

Seorang laki-laki tertarik untuk mengawini seorang wanita karena kekayaannya, karena wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan orang kaya. Pertimbangan ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar, yang dilakukan

²⁴ Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan dan Perceraian Di Bawah Undang-undang Islam*, (Selangor: International Law Book Services, 2012), hlm. 44.

oleh laki-laki yang kaya juga, walaupun nantinya belum tentu setelah perkawinan mereka bertambah kaya.

2.3.3. Tujuan karena keturunan atau status sosial

Seorang bangsawan muda tertarik kepada wanita atau gadis dari kalangan bangsawan juga lantas berusaha memadukannya, bukan karena gadis itu cantik atau kaya tetapi semata-mata keturunan yang berdarah bangsawan murni tidak tercampur dengan darah rakyat jelata. Seorang ulama tertarik kepada puteri ulama juga lantas berusaha memadukannya karena sama-sama berketurunan ulama.

2.3.4. Tujuan karena kecantikan

Kebanyakan seorang laki-laki tertarik pertama kali kepada seorang wanita bukan lantaran kekayaannya, bukan lantaran keturunannya, bukan juga karena kepribadian dan budi pekertinya, akan tetapi mereka tertarik karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup di dunia ini memang diciptakan Allah dihiasi dengan senang dan cinta kepada lawan sejenisnya, kepada paras yang elok, wajah yang cantik jelita, minimal terhadap wajah yang manis, bentuk tubuh yang montok tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus dan wanita itu mempunyai daya pengikat terhadap laki-laki sehingga ingin memilikinya.

2.3.5. Tujuan karena agama

Ketertarikan karena agama atau karena budi pekertinya, ketaatan kepada agama, ketaatan beribadah, ketaatan terhadap orang tuanya, dan kepada suaminya nanti. Pertimbangan agama disini bukanlah berarti wanita tersebut harus ahli agama atau pakar ilmu agama, syukur apabila memang demikian, tetapi agama disini yang penting adalah ketaatannya terhadap agama, ketekunan dalam beribadah, berbudi

pekerti mulia dan luhur, tidak hanya iri hati kepada sesiapaupun, tidak senang menghasut, dengki dengan sifat-sifat jahat lainnya walaupun ilmu agamanya sedang saja.²⁵

Hikmah Poligami

Islam adalah hukum Allah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi yang terakhir pula. Oleh karena itu, layak kalau ia datang dengan membawa undang-undang yang komplit, abadi dan universal, berlaku untuk semua daerah, semua masa, dan semua manusia. Islam tidak membuat hukum yang hanya berlaku untuk orang kota dan melupakan orang desa, untuk daerah dingin dan melupakan daerah panas, untuk masa tertentu dan melupakan masa-masa lainnya, serta generasi akan datang. Islam telah menentukan keperluan perorangan dan masyarakat dan menentukan ukuran kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Di antara manusia ada yang ingin mendapatkan keturunan, tetapi sayang istrinya mandul atau sakit hingga tidak mempunyai anak. Bukankah suatu kehormatan bagi si istri dan keutamaan bagi si suami kalau dia kawin lagi dengan seorang wanita tanpa menceraikan istri pertama dengan memenuhi hak-haknya.

Sementara ada juga laki-laki yang mempunyai nafsu seks yang luar biasa, tetapi istrinya hanya dingin saja atau sakit, atau masa haidnya itu terlalu panjang dan sebagainya, sedangkan si laki-laki tidak dapat menahan nafsunya lebih banyak seperti orang perempuan. Apakah dalam situasi seperti ini si laki-laki tersebut tidak boleh kawin dengan perempuan lain yang halal sebagai tempat mencari kawan tidur.

²⁵ Musafir Al-jahrani, *Poligami dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hlm. 74.

Adakalanya jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki, lebih-lebih karena akibat dari peperangan yang hanya diikuti oleh laki-laki dan pemuda-pemuda. Maka, di sini poligami merupakan kemaslahatan buat masyarakat dan perempuan itu sendiri sehingga dengan demikian mereka akan menjadi manusia yang tidak hidup sepanjang umur berdiam di rumah, tidak kawin dan tidak dapat melaksanakan hidup berumah tangga yang didalamnya terdapat suatu ketenteraman, kecintaan, perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan, sesuai pula dengan fitrah.

Inilah sistem poligami yang banyak ditentang oleh orang-orang Kristen Barat yang dijadikan alat untuk menyerang kaum muslimin, yang mereka sendiri membenarkan laki-lakinya untuk bermain dengan perempuan-perempuan cabul, tanpa suatu ikatan dan perhitungan. Poligami liar dan tidak bermoral juga. Kalau begitu, manakah dua golongan tersebut yang lebih kukuh dan lebih baik?.

Adapun hikmah diizinkan berpoligami antara lain seperti berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hiper seks dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negeri yang jumlah masyarakat wanitanya jauh lebih banyak dari kaum laki-laki.

Dalam kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, ada menjelaskan tentang hikmah-hikmah poligami. Antara lain sebagai berikut:²⁶

Pertama, salah satu bukti kasih sayang dan karunia Allah swt. kepada manusia adalah dengan membolehkan poligami dan membatasinya hingga empat wanita saja. Poligami tidak wajib dan tidak pula mandup (dianjurkan) melainkan suatu tindakan yang dibolehkan Islam karena ada tuntutan-tuntutan perkembangan peradaban dan desakan-desakan perbaikan kondisi yang tidak mungkin diabaikan syariat atau dilupakan begitu saja.

Kedua, Islam adalah risalah luhur di mana kaum muslimin bertanggungjawab untuk mengembannya dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Mereka tidak mungkin mampu mengusung risalah Islam itu kecuali jika memiliki negara yang kuat yang memiliki komonen yang lengkap sebagai negara seperti militer, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan dan pilar-pilar lain yang membuatkan sebuah negara berdaulat, bermartabat, disegani dan kukuh. Semua itu tidak akan terjadi kecuali jika jumlah penduduknya besar sehingga setiap sektor kegiatan pembangunan mempunyai sumber daya manusia yang memadai. Cara memperbanyak anggota masyarakat adalah pernikahan dini dan poligami.

Ketiga, negara sebagai pengusung risalah, posisinya sering mengalami kondisi krusial karena berbagai dampak jihad, seperti banyaknya anggota pasukan perang yang gugur di medan perang. Akibatnya, janda mereka harus mendapat perhatian serius dan tidak ada jalan lain yang lebih efektif selain menikahkan mereka. Selain itu, tidak ada cara mengembalikan berkurangnya penduduk yang meninggal kecuali dengan dengan

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan Asep Sobari, jilid 2, hlm. 281-285.

memperbanyak keturunan. Dan tentunya poligami adalah salah satu cara memperbanyak keturunan.

Keempat, di masyarakat tertentu, jumlah wanita bisa lebih banyak dari jumlah pria, seperti yang biasa terjadi setelah masa perang. Bahkan kelebihan jumlah wanita atas pria ini hampir menjadi fenomena umum di seluruh masyarakat dunia, termasuk dunia Islam disebabkan kaum pria lebih banyak terjun dalam dunia kerja yang berat sehingga berpengaruh terhadap usianya yang rata-rata lebih pendek dari usia wanita. Keunggulan jumlah wanita ini menempatkan poligami menjadi keniscayaan bahkan semakin mendesak dilakukan guna mengimbangi kelebihan jumlah dan menjaga kaum wanita. Jika tidak, maka kaum wanita akan mudah terjerumus dalam penyimpangan dan perbuatan nista yang akibatnya masyarakat menjadi rusak dan moralitasnya hancur.

Kelima, potensi reproduksi keturunan pada kaum pria lebih kuat daripada kaum wanita. Pria mampu melakukan hubungan badan sejak masa aqil baligh hingga saat tua, sedangkan wanita terbatas pada masa aktif haid, padahal haid sendiri adalah siklus bulanan yang dapat berlangsung hingga sepuluh hari. Wanita juga tidak dapat melakukannya sepanjang masa nifas dan melahirkan yang bisa mencapai empat puluh hari. Itu pun masih ditambah dengan kondisi kehamilan dan menyusui. Semua kondisi tersebut harus mendapat perhatian dan solusi yang tepat. Ketika istri sampai pada masa tidak sanggup lagi melaksanakan tugas hubungan suami istri, lantas apa yang harus dilakukan suami?. Apakah pilihan terbaik baginya adalah mempersunting seorang istri baru yang akan menjaga kehormatan diri dan kesucian kemaluannya? Atau menjalin hubungan gelap tanpa ikatan pernikahan, melainkan ikatan yang selayaknya dilakukan binatang? Padahal jelas sekali Islam sangat mengharamkan zina.

Keenam, ada kasus wanita yang mandul sehingga tidak dapat melahirkan, atau mengidap penyakit yang sangat sulit disembuhkan, tapi tetap ingin mempertahankan tali pernikahan, sementara suami menghendaki punya keturunan dan seorang istri yang dapat mengatur segala urusan rumahnya. Mana yang lebih baik bagi suami, pasrah menerima kenyataan yang pahit, karena mesti hidup dengan istri yang mandul tanpa dapat memberinya keturunan, atau bersama istri yang sakit dan tidak sanggup mengatur urusan rumahnya sehingga dia harus menanggung seluruh beban itu sendiri? Ataukah menceraikan istrinya itu, padahal ia masih ingin hidup bersamanya dan akan menderita jika berpisah? Atau, masih mungkinkah keinginan kedua belah pihak dapat dipenuhi bersama, yaitu dengan cara suami menikah lagi, sementara istri tetap bertahan dalam biduk rumah tangga dengannya dan tercapailah kemaslahatan bersama.

Apabila dikaji secara mendalam, Islam membolehkan berpoligami ialah karena terdapat beberapa faedah, hikmah dan sebab-sebab yang tujuannya adalah untuk memelihara kesucian dan kebaikan umat manusia. Antaranya adalah:

1. Untuk menjamin kemuliaan agama Islam dan memelihara kehormatan umatnya dari berbagai godaan dan rayuan.
2. Untuk menghindarkan atau mengurangi perzinaan dan pelacuran.
3. Untuk mengembangkan keturunan dengan cara halal.
4. Untuk mengurangkan anak-anak yang lahir di luar nikah, atau untuk mencegah pengguguran anak.
5. Untuk mengelakkan si suami berbuat maksiat, disebabkan si istri tidak dapat menyempurnakan kehendak nafsu suaminya pada setiap masa. Karena

disebabkan oleh beberapa halangan, seperti ketika haid, melahirkan dan sebagainya, sedangkan si suami mempunyai dorongan nafsu yang kuat.

6. Karena bilangan kaum wanita biasanya lebih banyak dari kaum laki-laki, terutama pada masa peperangan, dan kadangkala akibat dari peperangan yang menyebabkan banyak pula wanita-wanita menjadi janda.
7. Hampir semua perempuan menghendaki pimpinan dan sokongan dari kaum laki-laki karena telah fitrahnya.
8. Biasanya setiap pasangan suami dan istri menginginkan keturunan, tapi kadangkala ada istri yang mandul, dalam hal ini kalau tidak diizinkan berpoligami akan hilanglah salah satu tujuan dari perkawina itu.
9. Nafsu birahi kaum laki-laki untuk melakukan hubungan seks biasanya tidak terbatas menurut batas umur, walaupun umurnya sudah sampai 70 atau 80 tahun, sedangkan perempuan biasanya nafsu seksnya sudah tidak begitu begairah lagi apabila darah haidnya sudah terhenti dalam umur kira-kira 40 atau 50 tahun. Kalau istri tidak merelakan suaminya untuk kawin lagi, besar kemungkinan si suami akan terjerumus ke lembah dosa. Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah tidak mampu lagi untuk melayani nafsu suaminya, maka pengertiannya sangat diharamkan dalam hal ini.

BAB TIGA

PRAKTEK MASYARAKAT NEGERI PERAK TERHADAP POLIGAMI

3.1. Deskripsi Negeri Perak

Sebelum penulis membahas mengenai latar belakang atau sejarah berdirinya Mahkamah Syariah Perak Malaysia secara lebih terperinci, penulis ingin mendahulukan awal perbahasan ini mengenai sejarah Negeri Perak yang mana daripada sejarah tersebut, maka sedikit sebanyak dapat diketahui sejarah awal tertubuhnya Mahkamah Syariah di Perak. Adapun Negeri Perak merupakan salah satu bagian dari negeri-negeri di Malaysia. Ia terletak di bagian Barat Semenanjung Malaysia. Negeri Perak merupakan sebuah negeri yang diberi gelaran oleh Kerajaan Penjajah British sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu (*Federated Malay State*) yang telah ditubuhkan dalam tahun 1895.¹

Sejarah telah mencatatkan bahwa Islam mula sampai ke Negeri Perak pada awal abad ke-15. Ini berdasarkan kepada dua faktor sejarah. Pertama, beberapa daerah di Negeri Perak turut menjadi takluk empayar Kesultanan Melayu Melaka yang membawa pengaruh Islam ke negeri ini. Kedua, kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 menyebabkan sebilangan orang Melayu (Islam) Melaka berpindah ke Negeri Perak.²

¹ Pada waktu itu Negeri-negeri Tanah Melayu dibagikan kepada tiga bagian yaitu Negeri-negeri Selat (Pulau Pinang, Melaka dan Selangor), Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Negeri Sembilan, Perak dan Pahang), dan Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu (Kedah, Perlis, Kelantan dan Johor).

² Jabatan Agama Islam Perak, *Perkembangan Islam di Perak*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2004), hlm.1.

Mengikuti sejarah Melayu, Kerajaan Bemas dan Manjung merupakan kerajaan tertua di Perak ketika pemerintahan Sultan Mahmud Shah (1488 – 1511). P.E. Josselin De Jong menyatakan bahwa Sultan Mahmud Shah telah membantu Beruas menentang musuhnya di Manjung. Hasilnya, saudara perempuan Raja Bemas telah dikawinkan dengan cucu Paduka Tuan Melaka yang kemudiannya menjadi Bendahara.³

Oleh karena Perak belum mempunyai seorang Sultan, maka orang-orang Perak mengantar wakil mereka yaitu Tun Saban dan Nakhoda Kassim ke Kampar untuk menghadap Sultan Mahmud bagi memohon Putera Baginda untuk dirajai di Perak. Akhirnya pada tahun 1528, puteranya yang terakhir yaitu Raja Muzaffar Shah dilantik menjadi Sultan pertama di Perak.⁴

Sebelum kedatangan penjajah barat, khususnya sebelum kedatangan penjajah Inggeris, undang-undang Islam telah menjadi undang-undang dasar bagi negeri-negeri di Tanah Melayu. Malah, pada permulaan kedatangan penjajah Inggeris, undang-undang Islam masih lagi berkuat kuasa di negeri ini. Kemasukan undang-undang Inggeris dalam pentadbiran negeri Melayu dan peluasan tanah jajahannya telah berjaya mempengaruhi undang-undang Islam yang menjadi undang-undang dasar negeri Melayu.

Di Negeri Perak, keadaan yang penuh keributan diujahkan sebagai campuran Inggeris terhadap urusan negeri-negeri Melayu yang bermula pada tahun 1974.⁵ Ini adalah akibat dari perebutan takhta, perang saudara antara pembesar, pergaduhan

³ Abu Bakar Abdullah, *Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia. Masalah dan penyelesaiannya*, (Kuala Terengganu: Pustaka Damai, 1986), hlm. 9.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵ M.B. Hooker, *Undang-undang Islam Di Asia Tenggara*, Terjemahan Rohani Abdul Rahim dkk, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hlm. 149.

kongsi gelap dan kegiatan lanun yang mana kadang kala keadaan ini bertindih antara satu sama lain. Perebutan takhta sering dilihat oleh penjajah sebagai peluang untuk campur tangan. Pada tahun 1871, Sultan Ali telah mangkat di Sayong. Mengikut adat, Raja Muda sebagai bakal Sultan perlu hadir dalam upacara pemakaman kerana Sultan baru perlu dilantik sebelum almarhum dimakamkan.⁶

Raja Muda Abdullah Ibn Sultan Jaafar telah gagal menghadirkan diri meskipun telah ditunggu selama 40 hari. Akhirnya, pembesar-pembesar Perak membuat keputusan untuk melantik Raja Bendahara Raja Ismail sebagai Sultan dengan gelaran Sultan Ismail Muabidin Syah. Golongan pemerintah yang ingin membaiki kedudukan mereka telah mengundang campur tangan asing. Dalam hal ini, Raja Abdullah telah meminta bantuan British menerusi dua orang rakannya yang berpengaruh di Singapura yaitu Tan Kim Cheng dan W.H. Reed.

Akhirnya dengan bantuan British, Raja Muda Abdullah telah berjaya menyingkirkan Sultan Ismail. Setelah perjanjian pangkor,⁷ Raja Abdullah dilantik sebagai sultan dengan gelaran Sultan Abdullah Muhammad Syah dan bersemayam di Batak Rabit. Walaupun Raja Ismail diketepikan, tapi terus berkuasa di hulu Perak kerana pembesar-pembesar di situ masih mengiktiraf Raja Ismail. Ini bermakna, dua orang Sultan wujud di Perak ketika itu.⁸

Dalam perjanjian Pangkor, sebagaimana pada pasal 6 telah memperuntukkan agar Sultan Perak menerima seorang pegawai Inggeris yang dikenali sebagai Residen

⁶ Mohd Isa Othman, *Gerakan Protes: Dalam Perspektif Sejarah Malaysia Pada Abad Ke-19 dan Awal Abad Ke-20*, (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 1999), hlm. 55.

⁷ Perjanjian Pangkor adalah perjanjian pertama antara British-Perak yang ditandatangani pada bulan Januari 1874 oleh Sultan Abdullah, Raja Yusof dan pembesar-pembesar setempat.

⁸ Mohd Isa Othman, *Gerakan Protes*, hlm. 56-57.

yang mana nasehatnya mesti diambil dan dilaksanakan dalam semua hal kecuali hal-hal yang menyentuh adat dan agama Melayu.⁹ Antara Negeri-negeri Melayu bersekutu, Negeri Perak merupakan negeri yang pertama menerima Residen dan menggunakan undang-undang Inggeris. Residen pertama yang dilantik adalah J.W.W. Birch.¹⁰

Birch telah memperkenalkan sistem undang-undang pemungutan pajak yang diletakkan di bawah kawalan pengawal Inggeris. Sanksi akan dikenakan atas mereka yang memungut pajak tanpa kebenaran dari pihak Inggeris. Undang-undang untuk “menghapus budak” juga dikuatkuasakan. Bagi menjayakan pelaksanaan undang-undang ini, Birch telah menubuhkan Mahkamah Taiping untuk tujuan kehakiman. Selain itu juga, Inggeris juga telah memaksa Sultan Abdullah menandatangani dan mengishtiharkan undang-undang ini atas nama Baginda untuk memastikan undang-undang mereka dipatuhi.

Akhirnya, dengan menggunakan kekerasan, Inggeris berjaya memperkenalkan undang-undangnya. Hal ini menimbulkan kemarahan umat Islam dan Inggeris mendapat tentangan yang hebat di Perak. Pada 2 November 1875, J.W.W. Birch mati dibunuh oleh orang-orang Melayu di Pasir Salak.¹¹ Setelah berlakunya kejadian tersebut, satu Suruhanjaya telah dibentuk untuk menyiasat kasus pembunuhan tersebut yang dianggotai oleh Hakim Pillipo. Honorable C.B. Plunket dan Mr. Paul. Suruhanjaya ini beranggapan bahwa penentang-penentang Inggeris sebagai penjenayah. Namun mereka sedar atas kesilapan mereka yang memperkenalkan undang-undang mereka secara mendadak sehingga menimbulkan kemarahan penduduk setempat. Oleh karena

⁹ M.B. Hooeker, *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, hlm. 150.

¹⁰ Abu Bakar Abdullah, *Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam Di Malaysia*, hlm. 113.

¹¹ Mohd Isa Othman, *Gerakan Protes*, hlm. 69.

itu, Inggeris telah mengambil langkah berhati-hati dengan menarik hati pembesar-pembesar tentang kebaikan undang-undang pentadbiran mereka.¹²

Pada tahun 1876, apabila Sir Hugh Low menjadi Resien Perak, beliau telah memberi kuasa kepada Sultan untuk memperkenalkan undang-undang Inggeris dan jika berlaku pelanggaran terhadap undang-undang tersebut akan dihukum atas nama Sultan. Akhirnya Inggeris berjaya menjadi pemerintah yang diakui oleh pembesar-pembesar dan rakyatnya. Antara lain, Inggeris telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri atau disebut juga dengan Majlis Undangan Negeri yang dianggotai oleh Sultan, Residen, beberapa orang pembesar negeri, wakil saudagar dan seorang Kadi.

Majlis ini berperanan sebagai penggubal undang-undang mengikut undang-undang Inggeris. Dalam hal ini, pihak Inggeris telah berkompromi dengan Sultan untuk melahirkan satu pola pentadbiran dan undang-undang Islam yang sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena itu, suatu sistem undang-undang yang mentadbir Agama Islam dikanunkan dalam Majlis ini agar bisa menubuhkan Mahkamah Syariah. Begitu juga dengan Undang-undang Mahkamah Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang turut mewujudkan Mahkamah Syariah. Namun, wewenang Mahkamah Syariah begitu terhad yaitu hanya menyentuh undang-undang keluarga Islam saja, sedangkan wewenang undang-undang Inggeris meluas yang merangkumi semua penduduk sama ada yang beragama Islam atau sebaliknya. Dengan arti kata lain, ia telah mengatasi undang-undang Islam itu sendiri.¹³

¹² Abu Bakar Abdullah, *Ke Arah pelaksanaan Undang-undang Islam Di Malaysia*, hlm. 114.

¹³ Abdullah Ishak, *Islam Di Nusantara (Khususnya Di Tanah Melayu)*, (Selangor: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri, 1992), hlm. 202-203.

Untuk memastikan undang-undang Inggeris dilaksanakan dengan baik, maka hakim-hakim British dan pembesar-pembesar Melayu telah dilantik mengendalikan pengadilan di Mahkamah dan dengan mengadakan satu program lawatan. Oleh itu, Inggeris telah berjaya menggantikan undang-undang Islam dengan melaksanakan undang-undangnya di Perak dalam semua hal yang berhubung dengan undang-undang kecuali undang-undang keluarga Islam dan adat Melayu. Atas kemahuan dan nasihat Inggeris, undang-undang ini diselaraskan. Apabila orang-orang Islam terlibat dalam perkawinan dan perceraian hendaklah didaftarkan mengikut akta yang terdapat di dalam undang-undang yang diluluskan pada tahun 1886.¹⁴

Kemudian, perjanjian Pangkor 1874 ini turut dipeluas lagi dengan terbentuknya Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1895 yang mana ia memberi kuasa yang amat luas kepada Residen Ganeral untuk mentadbirnya, kecuali dalam urusan Agama Islam dan adat istiadat Melayu yang diserahkan kepada raja-raja Melayu. Akhirnya, perjanjian-perjanjian yang berbentuk sekular tersebut diperluas ke negeri-negeri lain seperti di Kelantan pada tahun 1910, di Johor pada 1914, di Terengganu pada 1919, di Kedah pada 1923 dan Perlis pada 1930.¹⁵

Pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dan di setiap negeri dalam perlembagaan tersebut memiliki perlembagaan masing-masing. Perlembagaan persekutuan telah dikuatkuasakan pada tahun 1957 dan peruntukan

¹⁴ Abu Bakar Abdullah, *Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam DiMalaysia*, hlm. 115.

¹⁵ Abdur Rahman Haji Abdullah, *Sejarah Dan Tamadun Islam*, (Selangor: Pustaka Ilmi, 2002), hlm. 381.

dalam perlembagaan tersebut mengesahkan bahwa Raja merupakan ketua agama di tiap-tiap negeri dan agama Islam adalah agama resmi bagi negeri-negeri tersebut.¹⁶

Oleh itu, sejak tahun 1948, Perlembagaan Negeri Perak telah mengiktiraf dengan resmi bahwa Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak sebagai Ketua Agama dan Adat Melayu di Negeri Perak Darul Ridzuan dan agama resmi bagi negeri tersebut adalah agama Islam. Baginda Sultan juga berkuasa penuh dalam segala hal yang berkaitan dengan pentadbiran.

Pada 23 Oktober 1949, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak telah ditubuhkan bagi membantu dan menasihati Sultan dalam semua perkara yang bersangkutan dengan Agama Islam di negeri ini. Satu-satunya aspek yang paling penting dalam fungsi penasihatnya adalah kecekapannya untuk mengeluarkan fatwa yaitu pendapat undang-undang yang formal. Di Perak, orang yang memainkan peran ini dikenali sebagai “Jawatankuasa Syariah”. Mereka terdiri dari Mufti yaitu tidak melebihi empat orang ulama yang mampu dan berupaya mengeluarkan fatwa.¹⁷

Pada tahun 1951, Undang-undang Pentadbiran Agama Islam telah diluluskan dan dilaksanakan bagi menggantikan enakmen yang digunakan sebelum ini. Tiga undang-undang yang telah diperkenalkan yaitu:

1. Undang-undang Perak No.6/1951 berkaitan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu.
2. Undang-undang Perak No. 1/1951 berkaitan Baitulmal, Zakat dan Fitrah.
3. Undang-undang Perak No. 8/1951 berkaitan Kawalan Wakaf.

¹⁶ M.B. Hooker, *Undang-undang Di Asia Tenggara*, hlm.164.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 165-166.

Pada 1 Mei 1952, Kerajaan Perak telah meluluskan Undang-undang Majlis Agama Islam dan Adat Melayu perak. Kedudukan Islam di Tanah Melayu semakin kukuh apabila negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada 1 Mei 1965 pula, Undang-undang pentadbiran Agama Islam Perak 1956 telah diluluskan sebagai pengganti kepada undang-undang sebelumnya. Di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam pula, beberapa bagian tertentu telah diwujudkan bagi melancarkan sebarang urusan yang dijalankan. Bagian-bagian tersebut adalah:

1. Bagian Fatwa yang dipengerusikan oleh Mufti.
2. Mahkamah Syariah yang diketuai oleh Qadhi Besar dan Qadhi Besar Daerah.
3. Bagian Pelajaran yang dikelolakan oleh Nazir.
4. Bagian Am yang ditadbir oleh seorang Sekretaris Besar yang menjalankan urusan untuk semua bagian.

Pada 1 Mei 1995, bagi memastikan institusi fatwa ini berfungsi sebagaimana yang sewajarnya, kerajaan-kerajaan negeri telah mengasingkan pentadbiran antara majlis Agama Islam dengan Mahkamah Syariah. Pentadbiran Mahkamah syariah telah menjadi sebuah jabatan yang tersendiri. Ia dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan. Mahkamah Syariah Perak ditubuhkan di bawah pembentukan Pasal 40 (1)(2)(3), Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 1992.

Walaupun undang-undang Islam masih lagi kekal dalam perundangan pada saat ini, namun kesan dari pengaruh undang-undang Inggeris terhadap undang-undang Islam disempitkan hanya kepada hal seperti nikah cerai, pembagian harta pusaka dan hal-hal yang berhubungan dengan kekeluargaan. Akibatnya, peran Mahkamah Syariah juga semakin kecil. Wewenangnya menjadi sempit dan tarafnya juga menjadi rendah.

Sedangkan undang-undang sivil mempunyai wewenang yang menyeluruh dan universal.

3.1.1 Berdirinya Mahkamah Syariah Perak dan Kedudukannya

Pada tanggal 3 Juli 1996 pertemuan para Menteri menyetujui saran Penyusunan Semula Mahkamah-mahkamah Syariah seluruh Malaysia melalui metode-metode berikut:

1. Didirikan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) oleh Pemerintah Federasi yang dipimpin oleh Ketua Hakim Syar'I Malaysia, juga Ketua Layanan Gunasama Pegawai syariah.
2. Wujudkan struktur organisasi JKSM.
3. Wujudkan empat (4) Jabatan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah untuk menimbang kembali kasus banding Mahkamah Rayuan Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah.
4. Mempertahankan struktur Mahkamah Syariah Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah termasuk akreditasi Ketua Hakim Syar'I dan Pegawai-pegawai Syariah.
5. Menciptakan Layanan Gunasama Pegawai Syariah.
6. Pemerintah Federasikan membiayai biaya Pegawai Syariah.

Diantara ke-4 Mahkamah Rayuan Syariah adalah Mahkamah Tinggi syariah Negeri Perak yang ditempatkan di bawah administrasi Jabatan Kehakiman Syariah Perak (JSKPK) didirikan berdasarkan Bagian 42 (1), (2) dan (3) Enakmen Administrasi Agama Islam Negeri Perak 1992. Pendiriannya mulai berlaku pada 1 Juni 1994 oleh Berita Pemerintah Daerah Perak Jld. 40 Nomor 8 tanggal 11 April 1995. Sejak didirikan, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak diatur bersama dengan Jabatan

Agama Islam Negeri Perak (JAIPk).¹⁸ Mahkamah Syariah Perak beralamat di Jalan Pari, Off Jalan Tun Abdul Razak, 30100, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Adapun kedudukan Mahkamah Tinggi Syariah Perak adalah Mahkamah lebih tinggi setelah Pengadilan Rendah Syariah Perak. Pihak-pihak yang tidak puas dengan kasus-kasus yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah bisa mengadu di Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah berpusat di Kota Bandaraya Ipoh. Dua orang Hakim Mahkamah Tinggi telah diberi tauliah dan ditunjuk untuk mendengar kasus-kasus Mal dan Kejahatan dibawah yurisdiksional Mahkamah Tinggi Syariah Perak. Antara kasus-kasus Mal yang didengar dibawah yurisdiksional Mahkamah Tinggi Syariah Perak adalah Permohonan Poligami, Harta Sepencarian, Hadhanah (Hak Pemeliharaan Anak), Konfirmasi Hibah, Konfirmasi Ahli Waris, Permohonan Ishtihar sebagai bukan Islam dan sebagainya. Sedangkan kasus-kasus kejahatan yang didengar dibawah yurisdiksional Mahkamah Tinggi Syaria adalah mengklaim sebagai bukan Islam, Mengajar Tanpa tauliah, mendorong maksiat dan sebagainya.

Hukum yang diterapkan di Mahkamah Syariah adalah Enakmen tahun 2004, Enakmen Prosedur Mal Perak Tahun 2004, Enakmen Keterangan Syariah Tahun 2004, Enakmen Kejahatan Syariah Perak Tahun 1992 dan Enakmen Prosedur Kejahatan Syariah Tahun 2004. Jika pihak-pihak tidak puas dengan putusan Hakim Mahkamah Syariah, pihak-pihak bisa mengadu ke Mahkamah lebih tinggi yaitu di Mahkamah Banding Syariah.¹⁹

¹⁸ Jabatan Kehakiman Syariah Perak Tahun 2007, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20-21.

Mulai 1 Mei 1995, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak telah dipisahkan dari manajemen Jabatan Agama Islam Perak dan memiliki pemerintahannya sendiri, dimana Jabatan Kehakiman Syariah Perak dipimpin oleh Yang Arif Ketua Hakim Syariah Negeri Perak. Personalia yang telah dipersetujui oleh Pembendahara Malaysia untuk Jabatan ini pada mulanya adalah sebanyak 45 Jabatan sesuai tawaran personalia jumlah 10 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Mei 1995. Kemudian ditambah lagi sebanyak 16 Jabatan sesuai tawaran personalia jumlah 2 Tahun 2001 yang berlaku mulai 1 Disember 2000.

Pada tahun 2004 melalui Tawaran Jumlah 8 Tahun 2004 yang berlaku pada 1 November 2002, sebanyak 24 Jabatan baru disetujui. Tawaran personalia restrukturisasi Bil.2/06 telah membuat seluruh personalia di Jabatan Kehakim Syariah Perak sebanyak 138 dan berlaku pada 1 April 2006. Jabatan Kehakiman Syariah Perak bertanggungjawab mengelola, mendengar dan memutus kasus-kasus di semua tingkat Pengadilan Rendah, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding, di dalam manajemen kasus Mal dan kejahatan.

3.1.2 Pelantikan Hakim Mahkamah Syariah Perak

Duli Yang Maha Mulia Sultan, setelah berkonsultasi dengan Dewan dan Ketua Hakim Syar'i, bisa menunjuk Hakim-hakim Pengadilan Syariah. Seseorang layak ditunjuk di bawah ayat (1) jika:

1. Dia seorang warganegara; dan
2. Dia:
 - a. Selama tidak kurang dari sepuluh tahun sebelum pengangkatannya, telah menjadi Hakim Mahkamah Rendah Syariah atau Kadhi atau Pendaftar atau

Jaksa Syar’I sesuatu negeri atau di suatu masa memegang setiap satu dari jabatan itu dan pada waktu yang lain memegang salah satu yang lain pula; atau

- b. Selama tidak kurang dari sepuluh tahun sebelum pengangkatannya telah menjadi Pengacara Syar’I sesuatu negeri atau setiap waktu sebelum itu di mana-mana negeri.
3. Orang yang, sebaik sebelum bagian ini mula berlaku, menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Enakmen sebelumnya dan melaksanakan fungsi-fungsi peradilan harus ketika bagian ini mulai berlaku, terus menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah setelah dia telah ditunjuk di bawah ayat (1).
4. Setiap pengangkatan dibawah ayat (1) harus disiarkan dalam Berita.²⁰

3.1.3 Yurisdiksi Mahkamah Syariah Perak

Mahkamah Tinggi Syariah harus memiliki yurisdiksi di seluruh Negeri Perak Darul Ridzuan dan harus dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah tinggi Syariah. Apa pun yurisdiksinya, Ketua Hakim Syar’I bisa bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan memimpin pengadilan.²¹

Mahkamah tinggi Syariah harus:

1. Dalam yurisdiksi kejahatan, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan seseorang yang beragama Islam dan bisa dihukum dibawah Enakmen Hukum Keluarga Islam (Perak) 2004 (Enakmen Bil. 6 Tahun 2004) atau di bawah setiap hukum tertulis lainnya yang sedang berlaku yang mengatur pelanggaran-

²⁰ Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak Tahun 2004, hlm. 59.

²¹ *Ibid*, hlm. 60.

pelanggaran terhadap rukun-rukun agama Islam, dan bisa mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu; dan

2. Dalam yurisdiksi *Malnya*, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan proses jika semua pihak dalam tindakan atau *prosiding* itu adalah orang Islam dan tindakan atau proses itu adalah berhubungan dengan:
 - a. Pertunangan, pernikahan, ruju', perceraian, pembubaran perkawinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan peradilan (farad atau apa-apa hal yang terkait dengan hubungan antara suami dan istri;
 - b. Apa-apa pembuangan atau klaim harta yang timbul dari setiap hal yang dinyatakan dalam sub perenggan (a);
 - c. Nafkah orang-orang tanggungan, kesahatarafan, atau penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak;
 - d. Pembagian atau klaim harta sepencarian;
 - e. Wasiat atau alang yang dibuat saat, *marad al-maut*, alang saat hidup, atau solusi yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan uang atau penilaian uang oleh seseorang orang Islam;
 - f. Wakaf atau nazar;
 - g. Pembagian dan pewarisan harta berwasiat atau tidak berwasiat;
 - h. Penentuan orang yang berhak atas bagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bagian-bagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak;
 - i. Pernyataan bahwa seseorang itu bukan lagi beragama Islam;

- j. Pernyataan bahwa seseorang yang telah mati itu adalah seorang Islam atau sebaliknya pada waktu kematiannya; dan
- k. Hal-hal lain yang berkenaan dengan yurisdiksi diberikan oleh setiap undang-undang tertulis.

3.2. Tatacara Poligami di Mahkamah Syariah Perak

Sebelum penulis membahas tentang faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur permohonan izin poligami, ada baiknya penulis terlebih dahulu menghuraikan secara ringkas tentang tatacara permohonan izin poligami di Mahkamah Syariah Perak.

Secara yuridis normatif yang berlaku di Malaysia, laki-laki dibenarkan mengawini dengan dua perempuan atau lebih. Namun, bukan dalam arti bebas melakukan kapan dan di mana saja tanpa melalui jalur formal. Boleh suami berpoligami, tapi harus mengikut prosedur yang berlaku dalam perundang-undangan yang ada.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Malaysia khususnya di negeri Perak Darul Ridzuan, Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak Tahun 2004 mengatakan bahwa,²² “jika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan sedangkan laki-laki itu memiliki istri atau istri-istri, ia atau laki-laki itu harus memohon kepada Mahkamah Syariah kebenaran untuk poligami”.²³

²² Di Malaysia terdapat beberapa pembagian propinsi yang disebut wilayah atau negeri, misalnya; Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Melaka, Kedah, Pahang dan sebagainya. Masing-masing negeri memiliki pengaturan Undang-undang Keluarga Islam tersendiri. Khusus di Negeri Perak, peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian disebut Enakmen Keluarga Islam Perak.

²³ Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 2004.

Ditetapkan syarat demikian supaya suami yang ingin melakukan poligami mempunyai kekukuhan ekonomi, fisik dan dan aspek-aspek lain yang harus dimiliki oleh suami. Karena pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dapat diketahui bahwa ia mampu atau tidak bila melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang perempuan. Bila pada tahap pemeriksaan oleh Hakim terdapat ciri-ciri bahwa ia tidak memiliki kemampuan maka Hakim dapat mencegah dan tidak memberikan izin kepada suami tersebut.

Seksyen 23 telah memerintukkan bahwa harus membuat permohonan izin poligami daripada Mahkamah sebelum seseorang laki-laki melakukan poligami. Setelah menerima permohonan dari pemohon, Mahkamah syariah akan mengatur tanggal sebutan dalam 21 hari dari tanggal pendaftaran penfailan kasus. Di dalam kasus poligami, Mahkamah Syariah akan memanggil istri pertama dahulu untuk mengetahui persetujuan beliau dan ini diikuti dengan memanggil calon pemohon dan bakal wali kepada bakal istri untuk menanyakan keterangan mereka. Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon jika berpuas hati²⁴ ;

- a. Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada antara lain seperti kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak bersetubuh, atau gila di pihak istri atau istri-istri yang sedia ada;
- b. Bahwa pemohon memiliki kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua

²⁴ *Ibid.*

istri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu;

- c. Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua istrinya mengikut kehendak hukum Syarak; dan
- d. Bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan *darar syari'e* kepada istri atau istri-istri yang sedia ada.

Di Mahkamah Syariah Perak, metode yang digunakan adalah Mahkamah akan memanggil istri pertama (istri pemohon yang ada) bersama pemohon untuk sebutan kali pertama yang dilakukan di depan Mahkamah Syariah. Jika istri pemohon (yang sedia ada) itu setuju dan tidak ada apa-apa protes terhadap permohonan pemohon untuk berpoligami, Mahkamah akan menangguhkan kasus itu dihadapan Hakim dan mengarahkan pemohon (suami) membawa bakal istri dan bakal wali untuk diambil keterangan pada tanggal tangguhan akan datang. Setelah Hakim mengambil keterangan dan mendengar persetujuan bakal istri dan wali kepada bakal istri, Mahkamah akan memutuskan apakah permohonan poligami pemohon disetujui atau tidak. Biasanya, dalam kasus-kasus permohonan poligami di Mahkamah Syariah Perak, jika permohonan berpoligami pemohon disetujui oleh istri, bakal istri dan wali kepada bakal istri pemohon, Mahkamah akan menyetujui permohonan poligami dan pada hari keputusan dibuat, Mahkamah akan mengeluarkan surat persetujuan menikah kepada pemohon untuk berpoligami.

Dalam kasus di mana istri tidak setuju suaminya berpoligami, Mahkamah saat sebutan kasus akan mengarahkan istri yang sedia ada untuk menyediakan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan setelah Laporan Pembelaan

diserahkan, pemohon dapat menjawab laporan pembelaan istri yang sedia ada dengan menyediakan jawapan kepada Laporan Pembelaan. Setelah Mahkamah memastikan pliding (dokumen) di dalam kasus lengkap, Mahkamah akan mengatur tanggal di depan Hakim Mahkamah Syariah untuk kasus dibicarakan.

Jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun, jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada tidak relevan dan Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus dengan memanggil bakal istri pemohon dan wali kepada bakal istri untuk diambil keterangan dan persetujuan dan selanjutnya menyetujui permohonan pemohon untuk berpoligami.

Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan izin poligami:

- a. Laporan Klaim (hendaklah diketik sendiri oleh pemohon) – 4 salinan.
- b. Kartu Identitas pemohon – 4 salinan.
- c. Surat nikah dengan istri yang sedia ada – 4 salinan.
- d. Slip gaji/Konfirmasi pendapatan – 4 salinan.
- e. Sertifikat kelahiran anak-anak yang dalam tanggungan – 4 salinan.
- f. Fomulir dari Kantor Agama (kebenaran menikah) – 4 salinan.
- g. Kartu identitas bakal istri (jika ada) – 4 salinan.
- h. Apa-apa dokumen terkait yang mendukung permohonan ini – 4 salinan.

- i. Fee Rp 100.00 (dibayar saat pendaftaran kasus).²⁵

3.3. Faktor Ketidapatuhan Masyarakat Terhadap Prosedur Permohonan Izin Poligami

Pelaksanaan poligami memiliki faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Faktor tersebut sangatlah variatif dan individualis tergantung dalam kondisi dan keadaan seseorang. Dan tidak bisa diklaim bahwa semua orang yang melakukan poligami didasarkan pada faktor yang sama. Faktor poligami yang diakibatkan oleh karena mandulnya isteri misalnya, belum tentu orang lain mengalami hal yang sama dalam melakukan poligami. Bahkan mungkin orang lain isterinya sangat subur untuk melahirkan anak-anak bagi suaminya. Dan bisa jadi orang lain melakukan poligami dikarenakan oleh keadaan seksualnya yang tinggi hingga khawatir bila ia tidak berpoligami akan memudaratkan bagi dirinya terjermus ke dalam lembah perzinaan. Oleh karena itu, tidak bisa disamaratakan terkait faktor berpoligami antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hal masih terdapatnya sesetengah masyarakat yang tidak patuh pada prosedur permohonan izin poligami ini terdapatnya beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor tersebut antara lainnya adalah:

- a. Biaya yang lebih rendah

Biaya yang lebih rendah adalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masih ada sebagian masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada prosedur permohonan izin poligami ini. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang

²⁵ *Ibid.*

telah dilakukan terhadap salah seorang masyarakat di kabupaten Taiping yang mana beliau telah melakukan poligami tanpa mengikut prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Seksyen 23 Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak yaitu dengan berpoligami di luar negeri di Danok, Thailand. Menurutnya, alternatif ini di pilih adalah karena beliau mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk berpoligami di luar negeri adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang akan ditanggung jika berpoligami dengan mengikut prosedur Mahkamah Syariah di dalam negeri, yaitu dengan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.000.000 untuk membayar kepada imam dan orang-orang yang berkaitan untuk mengawini mereka.

Menurut beliau lagi, jika dibandingkan dengan berpoligami di dalam negeri jauh bedanya karena dalam negeri harus mengikut banyak prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah sehingga banyak uang diperlukan sepanjang tempoh permohonan izin poligami tersebut berlangsung, ini belum termasuk dengan uang untuk perkawinan.²⁶ Disebabkan hal tersebutlah menyebabkan beliau lebih memilih untuk berpoligami di luar negeri dengan membelakangi apa yang telah ditetapkan dalam seksyen 23 Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak. Dengan demikian jelaslah bahwa antara faktor yang menjadi penyebab mengapa masih ada masyarakat yang tidak patuh pada ketetapan prosedur permohonan izin poligami ini adalah salah satunya disebabkan biaya yang lebih rendah.

b. Tanggapan bahwa Enakmen bertentangan dengan Hukum Islam

Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa ketentuan yang diatur dalam Seksyen 23 Enakmen Hukum Keluarga Islam tentang poligami ini bertentangan

²⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Encik Sufian, masyarakat yang melakukan poligami tanpa mengikut prosedur Mahkamah Syariah di Thailand, 12 Agustus 2017.

dengan Hukum Islam yang menghalalkan poligami tanpa adanya prosedur-prosedur yang rumit seperti yang sedia ada dalam Enakmen. Mereka mengatakan bahwa Undang-undang yang ada tentang poligami ini mempersulit kaum suami menikah lebih dari satu seolah-olah undang-undang tersebut menghalangi seorang suami untuk berpoligami, sedangkan dalam Islam tidak mensyaratkan demikian dan Islam memperbolehkan poligami. Hal inilah yang menyebabkan suami memilih untuk berpoligami tanpa mendapatkan izin dari Mahkamah Syariah.

Menurut Encik Idris, tanggapan ini kurang tepat karena tujuan Enakmen tersebut bukanlah untuk menghalang dan mengharamkan poligami, tetapi Enakmen tentang poligami tersebut bertujuan agar praktek poligami tidak disalahgunakan kebolehannya yang pada akhirnya akan mendatangkan kezaliman dan ketidakadilan kepada isteri-isteri dan anak-anak, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran.²⁷

Ketentuan yang ada ini bertujuan supaya terwujudnya keadilan kepada isteri sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang menyatakan dengan jelas jika suami tidak dapat berlaku adil dan memudaratkan isteri, maka mereka hanya diperbolehkan menikah dengan satu orang isteri. Maka dengan ini ketentuan yang terdapat dalam Enakmen tidak bertentangan dengan hukum syara' karena ketentuan yang ada bertujuan supaya terwujudnya keadilan kepada isteri.

c. Prosedur Permohonan Poligami Yang Ketat

²⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Encik Idris, staff Jabatan Agama Islam Taiping Perak, 25 Februari 2017.

Peraturan yang terdapat dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam khususnya tentang poligami sering kali dilihat sebagai suatu yang sulit dan membebankan bagi sebagian suami. Mereka berasumsikan bahwa proses poligami di Mahkamah Syariah akan menghabiskan waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka mengambil jalan mudah dengan berpoligami di negeri lain tanpa persetujuan dari Mahkamah Syariah.²⁸ Peraturan ketat yang terdapat dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam berkaitan poligami telah menyebabkan pihak suami mengambil jalan mudah untuk menikah dengan perempuan lain yaitu dengan menikah di luar negeri tanpa persetujuan dari Mahkamah Syariah.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Encik Hussain, bekas penolong pendaftar di Mahkamah Syariah tentang faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur permohonan izin poligami ini. Menurut beliau, sepanjang kerjanya sebagai penolong pendaftar di Mahkamah Syariah, beliau melihat adanya beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan Enakmen yang sedia ada ini. Antara faktor-faktor yang sering dijadikan alasan oleh pelaku adalah prosedur permohonan poligami yang ketat.

Menurutnya, dalam Enakmen Undang-undang Hukum Keluarga Islam berkaitan permohonan poligami, telah ditetapkan ketentuan-ketentuan prosedur yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin menikah lebih dari satu. Memang benar apa yang ditetapkan dalam Enakmen itu tidak diatur atau ditetapkan dalam Islam, tapi ianya bertujuan supaya poligami yang dibolehkan Islam itu tidak disalahgunakan sesuka hati

²⁸ Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga (Islam)*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 58.

mereka saja. Namun begitu tetap saja masih ada yang melanggar ketentuan tersebut disebabkan mereka merasakan prosedur yang ditetapkan itu terlalu ketat hingga mereka mengambil jalan yang lebih mudah yaitu dengan berpoligami tanpa kebenaran dari Mahkamah.²⁹

Sesungguhnya ketetapan Undang-undang yang sedia ada ini bukanlah bertujuan untuk mempersulit, tetapi Undang-undang yang sedia ada tentang poligami ini bertujuan supaya proses poligami menjadi lebih teratur dan terpenuhinya syarat-syarat berpoligami. Orang yang diberikan otoritas dalam memberikan putusan adalah Hakim. Bila ada pihak yang tidak puas hati dengan putusan yang ditetapkan Hakim berpeluang melakukan upaya hukum (mengajukan banding) ke Mahkamah Syariah yang lebih tinggi. Upaya hukum tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keputusan Mahkamah Syariah agar dapat diterima oleh orang yang akan melakukan poligami.³⁰

d. Permohonan poligami ditolak

Faktor mengapa masih adanya sebagian masyarakat yang tidak patuh pada prosedur permohonan izin poligami ini adalah disebabkan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Syariah untuk berpoligami tidak diterima. Hal tersebut dikernakan masih ditemukannya kekurangan dan ketidakmampuan suami bila berpoligami. Hal inilah yang menyebabkan mereka mengambil jalan pintas dengan menikah di luar negeri tanpa persetujuan dari Mahkamah Syariah.

²⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Encik Hussain, bekas penolong pendaftar Mahkamah Syariah Perak, 24 Februari 2017.

³⁰ Ahmad Ibrahim, *Al-Ahkam (Undang-undang Keluarga dan Pentadbiran Harta Wakaf)*, (Kuala Lumpur: Dwan Bahasa dan Pustaka, 1998), hlm. 80.

Menurut Encik Hussain, permohonan izin poligami ditolak juga menjadi salah satu faktor mengapa masih ada lagi masyarakat yang ingkar atau tidak patuh pada prosedur permohonan izin poligami ini. Menurut beliau lagi, kebanyakan kasus di Mahkamah Syariah individu yang membuat permohonan izin poligami yang mana permohonannya itu ditolak oleh Mahkamah tetap juga tidak patuh dengan mengambil jalan mudah dengan berpoligami di luar negeri meskipun Mahkamah Syariah telah memutuskan bahwa individu tersebut tidak layak atau tidak mampu untuk beristeri lebih dari satu.³¹

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Permohonan Izin Poligami di Mahkamah Syariah Perak

Hukum Keluarga Islam adalah bersumber dari wahyu Allah (Al-Quran) dan Sunnah Rasul (Hadis). Dari kedua sumber inilah hukum kekeluargaan Islam itu digali dan dikembangkan bahkan dari keduanya pula hukum keluarga Islam yang dikodifikasikan para pembuat *qanun* (Undang-undang) ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis di zaman sekarang.

Khususnya hukum perkawinan Islam bagi keluarga muslim, pengundangan hukum Islam di dunia Islam pada dasarnya dilakukan dalam rangka memperbaiki kedudukan umat Islam khususnya darejat kaum wanita. Untuk kepentingan itulah maka pengundangan hukum perkawinan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum berikut:

³¹ Wawancara yang dilakukan dengan Encik Hussain, bekas penolong pendaftar Mahkamah Syariah Perak, 24 Februari 2017.

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas mempersulit perceraian
4. Asas monogami dan pembatasan poligami
5. Asas kedewasaan
6. Asas memperbaiki dan mengangkat darejat kaum wanita
7. Asas legalitas
8. Asas selektifitas

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa ketentuan yang diatur dalam Enakmen Kekeluargaan Islam Perak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan. Di Malaysia, Mahkamah Syariah mempunyai masalah tertentu untuk membolehkan poligami hanya dengan izin Mahkamah Syariah, yaitu Mahkamah Syariah yang menentukan keadilan dan kemampuan seseorang dalam memberikan nafkah. Dalam Fiqh dan Usul Fiqh, konsep masalah adalah suatu konsep yang sangat penting. Hal ini disebabkan keringanan (*rukhsah*) berpoligami ini disalahgunakan khususnya oleh orang-orang yang jahil. Tujuan utama diturunkan syariat adalah agar terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. *Mashlahah mursalah* menurut istilahnya adalah suatu kemaslahatan mengenai hukum syara yang tidak disyariatkan oleh syara yang mewujudkan hukum dan juga tidak ada dalil-dalil syara yang menunjukkan ada atau tiada hukum tertentu.³²

³² Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Pengantar Usul Fiqh*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2010), hlm. 126.

Terdapat banyak dalil menunjukkan syara' menjaga *mashlahah* manusia pada setiap hukum. Antaranya dalil nas³³:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ ۷۸

Artinya:

“Dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama.. (surah al-Hajj ayat 78)

Sabda Nabi Muhammad s.a.w:

“tidak mudarat dan tidak memudaratkan.”

Ulama berpendapat bahwa *Mashlahah Mursalah* boleh dijadikan sumber hukum telah meneliti berbagai aspek dan mereka sangat berhati-hati, bukan berdasarkan nafsu atau sangkaan semata-mata. Mereka menetapkan syarat-syarat tertentu dalam menetapkan dasar hukum *Mashlahah Mursalah*. Syarat berhujah dengannya mengikut pendapat ulama adalah³⁴:

1. Kemaslahatan hendaklah jelas dan pasti bukan berdasarkan *waham* atau sangkaan semata-mata.
2. Segala kemaslahatan dalam penetapan hukum mestilah benar-benar bertujuan untuk memberi manfaat serta menolak kemudaratatan.
3. Kemaslahatan mestilah bersifat umum, bukannya untuk kepentingan peribadi. Iaitu untuk manfaat manusia sejagat atau menolak kemudaratatan terhadap mereka, bukannya kepentingan segelintir manusia saja.

³³ *Ibid*, hlm. 130.

³⁴ *Ibid*, hlm, 132-133.

4. Segala hukum yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan prinsip yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma ulama.
5. Masalah itu sampai ke peringkat masalah daruriyah yang lima dan mengikut susunannya, yaitu: Menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar *mashlahah mursalah* negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.³⁵ Oleh itu, bagi masyarakat yang menganggap bahwa prosedur pendaftaran poligami yang ditetapkan dalam Enakmen itu bertentangan dengan Hukum Islam sudah dapat ditangkis dengan melihat konsep *mashlahah* yang ada dalam kajian fiqh yang lebih mengutamakan *mashlahah* bagi manusia meskipun tiada nash Al-Quran maupun Hadith yang mengaturnya.

Dalam Hukum Kekeluargaan khususnya, suami adalah merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Apabila sesuatu keputusan itu dibuat haruslah terlebih dahulu baginya untuk bermusyawarah bersama dengan keluarga, barulah dia dikira seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Jika suatu keputusan itu dilakukan tanpa kerelaan istri, ianya akan menghancurkan hati si istri, bertentangan dengan konsep *al-mu'asyarah bil-ma'ruf* (memperlakukan istri dengan baik), seperti yang diingatkan Allah dalam Surah An-Nisa':

³⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm. 83.

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرِفِ... ١٩

Artinya:

Dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik.

Rasulullah sendiri amat menghargai istrinya, baginda berpesan ada kaum suami apabila tergoda dengan wanita lain, segeralah menggauli istri di rumah. Baginda tidak pernah berpesan agar segera menikahi wanita itu dan menduakan isteri karena baginda menunjukkan contoh menikah lagi bukan karena nafsu, tapi karena kepentingan agama.

Semasa mengulas ayat Al-Quran, pandangan telah dikemukakan oleh Parves bahwa keizinan isteri pertama adalah perlu karena layanan yang adil dan saksama terhadap para isteri tidak mungkin dapat diberikan jika tiada keizinan sedemikian, dan terpulanglah kepada pihak berkuasa negeri (bukan seseorang individu) untuk menentukan sama ada wujudnya hal keadaan sosial yang boleh membenarkan seorang lelaki mempunyai lebih dari seorang isteri pada masa yang sama. Dengan itu, pihak berkuasa negeri boleh membenarkan ataupun melarang poligami melalui Enakmen perundangan bergantung kepada hal keadaan suatu masa. Sekiranya hal keadaan sosial yang mewajarkan poligami tidak wujud, tidaklah perlu timbul soal untuk membenarkan lebih dari seorang isteri.³⁶

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, penulis menganalisis bahwa prosedur pendaftaran poligami yang diatur dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Islam sendiri menitikberatkan soal keadilan dan kemampuan seorang suami untuk berpoligami. Begitu juga dalam

³⁶ Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Undang-undang Islam*, hlm. 40-41.

Undang-undang yang menyatakan bahwa seorang itu layak untuk berpoligami apabila laki-laki tersebut dinyatakan mampu untuk melakukan poligami oleh Mahkamah Syariah. Maka jelaslah apa yang terkandung dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam sama sekali tidak bertentangan dengani syariat Islam.

Dengan demikian, penulis memahami bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah tentang prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk berpoligami itu adalah merupakan suatu penyelesaian terhadap permasalahan poligami. Hal ini demi mengelakkan berlakunya permasalahan khususnya terhadap isteri dan juga anak-anak.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan bab penutup, dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis juga akan mengutarakan beberapa saran yang dianggap penting dan bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini, diantara kesimpulan-kesimpulannya adalah seperti berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Seksyen 23 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak memperuntukkan bahwa harus membuat permohonan izin poligami daripada Mahkamah Syariah sebelum seorang laki-laki melakukan poligami. Di Mahkamah Syariah Perak, metode yang digunakan adalah Mahkamah akan memanggil istri pertama (istri pemohon yang ada) bersama pemohon untuk sebutan kali pertama yang dilakukan di depan Mahkamah Syariah. Jika istri pemohon (yang sedia ada) itu setuju dan tidak ada apa-apa protes terhadap permohonan pemohon untuk berpoligami, Mahkamah akan menangguhkan kasus itu dihadapan Hakim dan mengarahkan pemohon (suami) membawa bakal istri dan bakal wali untuk diambil keterangan pada tanggal tangguhan akan datang. Setelah Hakim mengambil keterangan dan mendengar persetujuan bakal istri dan wali kepada bakal istri, Mahkamah akan memutuskan apakah permohonan poligami pemohon disetujui atau tidak. Jika seandainya istri tidak setuju suaminya berpoligami, Mahkamah saat sebutan kasus akan mengarahkan istri yang sedia

ada untuk menyediakan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan setelah Laporan Pembelaan diserahkan, pemohon dapat menjawab laporan pembelaan istri yang sedia ada dengan menyediakan jawapan kepada Laporan Pembelaan. Setelah Mahkamah memastikan pliding (dokumen) di dalam kasus lengkap, Mahkamah akan mengatur tanggal di depan Hakim Mahkamah Syariah untuk kasus dibicarakan. Jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun, jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada tidak relevan dan Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus dengan memanggil bakal istri pemohon dan wali kepada bakal istri untuk diambil keterangan dan persetujuan dan selanjutnya menyetujui permohonan pemohon untuk berpoligami.

2. Berdasarkan hasil kajian terhadap masyarakat di Kabupaten Taiping Perak, diketahui bahwa antara faktor-faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur permohonan izin poligami di Mahkamah Syariah adalah: biaya yang lebih rendah, tanggapan bahwa Enakmen bertentangan dengan Hukum Islam, prosedur permohonan izin poligami yang ketat dan permohonan poligami ditolak.
3. Prosedur permohonan izin poligami di Mahkamah Syariah Perak juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena tujuan ditetapkan prosedur tersebut adalah untuk menjaga *mashlahah* masyarakat. Untuk menjaga kebolehan berpoligami tidak disalahgunakan yang akhirnya akan berlaku kezaliman

terhadap kaum perempuan maka negara dibenarkan mengadakan penertiban atas dasar *mashlahah mursalah*. Antara dalil menunjukkan syara' menjaga *mashlahah* manusia pada setiap hukum adalah antaranya dalil nas:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ ۷۸

Artinya:

“Dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama.. (surah al-Hajj ayat 78)

Sabda Nabi Muhammad s.a.w:

“tidak mudarat dan tidak memudaratkan.”

4.2. Saran-saran

Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi saran dengan harapan dapat memberi manfaat kepada semua kalangan, khususnya bagi masyarakat yang berhasrat ingin melakukan poligami. Adapun yang menjadi saran dalam hal ini adalah:

- 4.2.1. Bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami, maka lakukanlah sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ianya bagi mengelakkan kesulitan di kemudian hari bilamana perkawinan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan Mahkamah Syariah didaftarkan kembali.
- 4.2.2. Bagi laki-laki yang telah melakukan poligami tanpa izin dari Mahkamah Syariah, hendaklah melaporkan kepada pihak Mahkamah Syariah untuk didaftarkan kembali. Ini kerana perkawinan yang tidak didaftarkan adalah tidak sah disisi undang-undang negara. Ini berarti bahwa istri kedua, ketiga maupun

keempat tidak mempunyai hak sebagai seorang istri dan tidak boleh membuat apa-apa tuntutan di Mahkamah Syariah.

- 4.2.3. Kepada setiap suami, kalau memang ingin berpoligami, berlaku adillah. Jangan sekadar mengikuti nafsu hingga cenderung untuk tidak adil dan cenderung pada salah satu istri atau bahkan sampai melalaikan nafkah. Dan jika sebenarnya tidak mampu, jangan tetap memaksa diri untuk berpoligami. Pertimbangkanlah, adakah itu suatu keperluan atau sekadar keinginan semata mata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdur Rahman Haji Abdullah, *Sejarah Dan Tamadun Islam*, Selangor: Pustaka Ilmi, 2002.
- Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Pengantar Usul Fiqh*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2010.
- Abu Bakar Abdullah, *Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia. Masalah dan penyelesaiannya*, Kuala Terengganu: Pustaka Damai, 1986.
- Abdullah Ishak, *Islam Di Nusantara (Khususnya Di Tanah Melayu)*, Selangor: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri, 1992.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Jones, *Sistem Undang-undang Malaysia*, cet. 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Ahmad Ibrahim, *Al-Ahkam (Undang-undang Keluarga dan Pentadbiran Harta Wakaf)*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998),
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Cv. Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukuum Islam*, Bandung: Margahayu Permai, 2008.
- Dasuki Haji Ahmad, *Poligami dalam Islam*, Kuala Lumpur, Pustaka Al-Hilal, 2010.
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak Tahun 2004.
- Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 2004.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Herlina Amran, *Poligami Dalam Islam*, 2 Mac 2014. Diakses pada tanggal 3 Juni 2017 dari situs: <http://firmadani.com/poligami-dalam-islam>.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandarmaju, 1990.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ilham, *Poligami Dalam Kaitannya Dengan Berlaku Adil, Studi Terhadap Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastia*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: 2012.
- Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Jalaluddin, *Poligami Dalam Hukum Islam, Studi Poligami Dengan Janda dan Kaitannya Dengan Aspek Sosial*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam IAIN Ar-Raniry: 2001.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, Kuala Lumpur: Dar El_Fajr.
- Jabatan Agama Islam Perak, *Perkembangan Islam di Perak*, Kuala Lumpur:Telaga Biru, 2004.
- Jabatan Kehakiman Syariah Perak Tahun 2007.
- K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Maulia Nazakhatami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Penghapusan Poligami Dalam Rancangan Amendamen Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Versi LBH APIK*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2015.
- M.B. Hooker, *Undang-undang Islam Di Asia Tenggara*, Terjemahan Rohani Abdul Rahim dkk, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1999.
- Mohd Isa Othman, *Gerakan Protes: Dalam Perspektif Sejarah Malaysia Pada Abad Ke-19 dan Awal Abad Ke-20*, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 1999.
- Musafir Al-jahrani, *Poligami dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.

- Najibah Mohd Zin, *Undang-undang Keluarga (Islam)*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan dan Perceraian Di Bawah Undang-undang Islam*, Selangor: International Law Book Services, 2012.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Said sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan M. Thalib, jilid 6, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Shahlal Ahmad, *Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran m.Quraish Shihab)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam IAIN Ar-Raniry: 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi' I 2*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wawancara yang dilakukan dengan Encik Sufian, masyarakat yang melakukan poligami tanpa mengikut prosedur Mahkamah Syariah di Thailand, 12 Agustus 2017.
- Wawancara yang dilakukan dengan Encik Hussain, bekas penolong pendaftar Mahkamah Syariah Perak.
- Wawancara yang dilakukan dengan Encik Idris, Pegawai Jabatan Agama Islam Taiping Perak, 25 Februari 2017.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Perak Darul Ridzuan*, Desember 2015. Diakses pada tanggal 20 Desember 2015 dari situs: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Perak_Darul_Ridzuan.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Prosedur*, Januari 2016. Diakses pada tanggal 5 Januari 2016 dari situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Jabatan Kehakiman Syariah Perak*, Diakses pada tanggal 10 Mac 2017 dari situs: <http://www.esyariah.gov.my/portal>.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000.



NEGERI PERAK

ENAKMEN 6 TAHUN 2004 ENAKMEN KELUARGA ISLAM (PERAK) 2004

Tarikh Persetujuan DiRaja :	15 September 2004
Tarikh disiarkan dalam <i>Warta</i> :	22 September 2004
Tarikh mula berkuatkuasa :	1 Jun 2005 [Pk P.U. 20/05]

SUSUNAN SEKSYEN

BAHAGIAN I - PERMULAAN

- Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
- Seksyen 2. Tafsiran
- Seksyen 3. Kecualian prerogatif
- Seksyen 4. Pemakaian
- Seksyen 5. Kriteriaum bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam
- Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

- Seksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan
- Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan
- Seksyen 9. Pertalian yang dilarang perkahwinan
- Seksyen 10. Orang daripada agama lain
- Seksyen 11. Perkahwinan tak sah
- Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan

- Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki
- Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan
- Seksyen 15. Pertunangan

Permulaan Kepada Perkahwinan

- Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin
- Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin
- Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie
- Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah
- Seksyen 20. Tempat perkahwinan
- Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian
- Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan
- Seksyen 23. Poligami
- Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

- Seksyen 25. Pendaftaran
- Seksyen 26. Perakuan nikah
- Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau salah di sisi undang-undang
- Seksyen 28. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar
Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam
- Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan
- Seksyen 30. Salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar
- Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri
Perak Darul Ridzuan
- Seksyen 32. Daftar yang tidak sah di sisi undang-undang
- Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkawinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan
dahulunya di bawah mana-mana undang-undang
- Seksyen 34. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PERUNTUKAN PELBAGAI BERHUBUNG DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

- Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Seksyen 36. Pelanggaran seksyen 32
Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan
Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan
Seksyen 39. Mengakadnikahkan tanpa kuasa
Seksyen 40. Kesalahan berhubung dengan akad nikah perkahwinan
Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa
Seksyen 42. Membetulkan kesilapan
Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan
Seksyen 44. Bukti

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat perintah
Seksyen 46. Pertukaran agama
Seksyen 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah
Seksyen 48. Timbang tara oleh Hakam
Seksyen 49. Perceraian khul' atau cerai tebus talaq
Seksyen 50. Perceraian di bawah ta'liq atau janji
Seksyen 51. Perceraian dengan li'an
Seksyen 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'
Seksyen 53. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh
Seksyen 54. Anggapan mati
Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan
Seksyen 56. Pendaftaran perceraian
Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah
Seksyen 58. Mut'ah atau pemberian sugu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut
Seksyen 59. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 60. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi isteri, dan kesan nusyuz
Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi seseorang tertentu
Seksyen 62. Pentaksiran nafkah
Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran bagi nafkah
Seksyen 64. Mengkompaun nafkah

- Seksyen 65. Lamanya tempoh perintah nafkah
- Seksyen 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian
- Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah
- Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah
- Seksyen 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya
- Seksyen 70. Menuntut tunggakan nafkah
- Seksyen 71. Nafkah sementara
- Seksyen 72. Hak tempat tinggal
- Seksyen 73. Kewajipan menanggung nafkah anak
- Seksyen 74. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak
- Seksyen 75. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak
- Seksyen 76. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak
- Seksyen 77. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak
- Seksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak
- Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai anggota keluarga
- Seksyen 80. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak
- Seksyen 81. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadhanah atau Penjagaan Kanak-Kanak

- Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga knak-kanak
- Seksyen 83. Kelayakan yang perlu untuk penjagaan
- Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang
- Seksyen 85. Lamanya penjagaan
- Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sah taraf
- Seksyen 87. Kuasa Mahkamah untuk membuat perintah mengenai penjagaan
- Seksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

Penjagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 89. Orang yang berhak kepada penjagaan

Seksyen 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih

Seksyen 91. Pelantikan penjaga oleh Mahkamah

Seksyen 92. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat

Seksyen 93. Penjaga bersama dengan ibu

Seksyen 94. Perubahan kuasa penjaga harta

Seksyen 95. Pemecatan penjaga

Seksyen 96. Cagaran hendaklah diberi

Seksyen 97. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah

Seksyen 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal

Seksyen 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak daripada pendapatan

Seksyen 100. Perintah khas mengenai harta kecil

Seksyen 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.

Seksyen 102. Perintah larangan oleh Mahkamah

Seksyen 103. Penjaga bagi anak yatim

Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dll.

Seksyen 105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

Relif-Relief Lain

Seksyen 106. Kuasa Mahkamah untuk membatalkan dan menahan perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan nafkah

Seksyen 107. Perintah tegahan

Seksyen 108. Perintah larangan melupuskan harta sepencarian

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Perak Darul Ridzuan

Seksyen 110. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di Negeri Perak Darul Ridzuan

Kesahatarafan Anak

Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa

Seksyen 112. Kelahiran lebih daripada empat tahun selepas pembubaran perkahwinan

Seksyen 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat

Seksyen 114. Persetubuhan syubhah

Seksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah

Seksyen 116. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan

Seksyen 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah

Seksyen 118. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa

Seksyen 119. Pengakuan selain sebagai anak, ibu atau bapa

Seksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Pembahagian Harta Sepencarian

Seksyen 122. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian

Rayuan

Seksyen 123. Rayuan

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah

Seksyen 125. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah

Seksyen 126. Tidak membuat laporan

Seksyen 127. Meninggalkan langsung isteri

Seksyen 128. Menganiaya isteri atau suami

Seksyen 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri

Seksyen 130. Isteri tidak menurut perintah

Seksyen 131. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan

Seksyen 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai

Seksyen 133. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah

Seksyen 134. Percubaan dan subahat

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 135. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah

Seksyen 136. Pemansuhan

**ENAKMEN 6 TAHUN 2004
ENAKMEN KELUARGA ISLAM (PERAK) 2004**

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 11. Perkahwinan tak sah

Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.

Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan

(1) Sesuatu perkahwinan yang berlawanan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini.

(2) Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan subseksyen 40(2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah.

Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki

Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada-

- (a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut Hukum Syarak; atau
- (b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas siasatan yang sewajarnya di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Hakim mengikut Hukum Syarak; persetujuan tersebut boleh diberikan jika perempuan tiada mempunyai wali dari

nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.

Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan

(1) Tiada seorang perempuan pun boleh, dalam masa perkahwinannya dengan seorang lelaki berterusan, berkahwin dengan seseorang lelaki lain.

**ENAKMEN 6 TAHUN 2004
ENAKMEN KELUARGA ISLAM (PERAK) 2004**

**BAHAGIAN II - PERKAHWINAN
Permulaan Kepada Perkahwinan**

Seksyen 23. Poligami

(1) Tiada seorang lelaki pun semasa berterusannya suatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.

(2) Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124.

(3) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Negeri Perak Darul Ridzuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri Perak Darul Ridzuan dan perkahwinan di luar Negeri Perak Darul Ridzuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam Negeri Perak Darul Ridzuan.

(4) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennnya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

(5) Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang difikirkan oleh Mahkamah boleh memberi keterangan mengenai perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati-

(a) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandangkan kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

(b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang

tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;

(c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan

(d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan *darar syari'e* kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

(6) Suatu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan iqrar yang dikehendaki oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas setiap isteri yang sedia ada.

(7) Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan di bawah Enakmen Tatacara *Mal (Perak) 2004 [Enakmen Bil. 7 Tahun 2004]*.

(8) Mana-mana orang yang membuat akad nikah berlawanan dengan subseksyen (1) hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jika jumlah itu tidak dibayar sedemikian, hendaklah dituntut sebagai hutang.

(9) Tatacara bagi akad nikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini hendaklah serupa dalam segala perkara dengan yang terpakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Perak Darul Ridzuan di bawah Enakmen ini.

(10) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan itu-

(a) untuk menghendaki seseorang untuk membuat pembayaran nafkah kepada isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada; atau

(b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh mereka dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan.

**ENAKMEN 6 TAHUN 2004
ENAKMEN KELUARGA ISLAM (PERAK) 2004**

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau salah di sisi undang-undang

Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap orang untuk melaporkan kepada Pendaftar tentang hal keadaan mana-mana kes yang dalamnya dia berpendapat bahawa mana-mana perkahwinan yang dikatakan adalah tak sah atau bahawa mana-mana perkahwinan yang boleh didaftarkan telah diakadnikahkan dengan melanggar Enakmen ini.

Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan

Tiap-tiap Pendaftar hendaklah menyimpan suatu Daftar Perkahwinan dan buku-buku sebagaimana yang ditetapkan oleh Enakmen ini atau oleh kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini, dan tiap-tiap perkahwinan yang diakadnikahkan dalam Negeri Perak Darul Ridzuan hendaklah didaftarkan dengan sewajarnya oleh Pendaftar dalam Daftar Perkahwinannya.

Seksyen 32. Daftar yang tidak sah di sisi undang-undang

Tiada seorang pun, selain Pendaftar yang dilantik di bawah seksyen 28, boleh-

- (a) menyimpan apa-apa buku yang adalah atau yang berupa sebagai suatu daftar yang disimpan mengikut Enakmen ini; atau
 - (b) mengeluarkan kepada mana-mana orang apa-apa dokumen yang adalah atau yang berupa sebagai suatu salinan perakuan perkahwinan atau perakuan perkahwinan yang didaftarkan oleh Pendaftar.
-

**ENAKMEN 6 TAHUN 2004
ENAKMEN KELUARGA ISLAM (PERAK) 2004**

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah

Mana-mana lelaki yang berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Seksyen 126. Tidak membuat laporan

(1) Barang siapa yang berkewajipan membuat sesuatu laporan di bawah Enakmen ini dengan sengaja cuai atau tidak berbuat demikian adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

(2) Barang siapa yang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki mengemukakan sesuatu permohonan di bawah Enakmen ini atau dikehendaki memberi apa-apa maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan pendaftaran dokumen itu, dengan sengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama lengkap : Mohd Najib Bin Abdullah Sani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Besar Kuching Sarawak / 31 Januari 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin
6. Kebangsaan/Suku : Malaysia / Melayu
7. Alamat : Rukoh Darussalam, Banda Aceh
8. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa / 111309820
9. Nama Orang Tua/Wali
 - A. Ayah : Abdullah Sani Abd Razak
 - B. Ibu : Hendon Ghazali
 - C. Alamat : Kg Changkat Ibul, 34850 Taiping Perak
10. Riwayat Pendidikan
 - A. Sekolah Dasar : SK. Changkat Ibul. Tahun 1997-2002
 - B. Sekolah Menengah : Madrasah Irsyadiah Al-Asyraf Al-Wataniah Pondok Sg. Bakap. Tahun 2003-2007.
: SABK Ma'ahad Tarbiah Al-Islamiah. 2008-2009.
 - C. Sekolah Tinggi : Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS), Perak. Tahun 2010-2013.
 - D. Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry (UIN) Darusslam Banda Aceh. Tahun 2013 hingga sekarang.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Perbuat Dengan Sebenarnya Untuk Dapat Dipergunakan Seperlunya.

Darussalam, 6 Juni 2017
Penulis

Mohd Najib Abdullah Sani
NIM: 111309820